



# RENCANA KERJA DKP ACEH TAHUN 2023

## DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH TAHUN 2022

Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja

Jalan Sisingsamangaraja Ujung, Gp. Lampulo Kec. Kuta Alam Banda Aceh

Telp. (0651) 22951 – 22836 – 23181- 636466 fax. (0651) 22951 kode Pos 23127 website. [dkp.acehprov.go.id](http://dkp.acehprov.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan hidayahNya Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dapat menyelesaikan penyusunan ***"Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2023"***, teriring salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau.

Perencanaan kerja tahunan merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dan pembuatan keputusan dengan memanfaatkan pengetahuan aspiratif secara maksimal. Perencanaan kerja tahunan merupakan arahan kepada organisasi untuk mengembangkan pengukuran terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki program pembangunan yaitu Perencanaan Kerja Tahunan yang merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan global serta tetap dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Pelaksanaan pembangunan disektor kelautan dan perikanan merupakan bagian integral dari pembangunan sektor perekonomian, yang telah memberikan kemajuan baik dari segi peningkatan produksi maupun produktivitas, kontribusi sumbangan devisa negara maupun penghasilan dari para pembudidaya ikan dan nelayan dapat dijadikan sumber pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, mengingat potensi dan peluang usaha, prospek serta keunggulan sektor perikanan dan kelautan masih dapat ditingkatkan dan digali lagi dengan melalui diversifikasi dan inovasi teknologi.

Rencana Kerja(Renja) Tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh disusun sebagai bahan pedoman dan arah pembangunan sektor perikanan dan kelautan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian daerah secara signifikan. Diharapkan melalui perencanaan kerja tahunan dengan mengembangkan langkah-langkah strategis dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud suatu pelayanan yang prima.

Semoga perencanaan kerja tahunan ini dapat digunakan sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2023.

Banda Aceh, Juni 2022

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH**



**ALIMAN, S.Pi, M.Si**

NIP. 19750210 200312 1 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penyusunan .....	5
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun lalu dan Capaian Renstra Tahun 2017-2022 .....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	32
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	62
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPA .....	64
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	90
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	91
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Program dan Kegiatan .....	93
BAB V. PENUTUP	

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Provinsi Aceh menyimpan potensi ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang sangat besar, meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya (laut, payau dan air tawar), pengolahan hasil perikanan dan juga pariwisata bahari. Luas daratan Provinsi Aceh sebesar 57.365,67 km<sup>2</sup>, sedangkan luas perairannya mencapai 295.370 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 56.563 km<sup>2</sup> berupa perairan teritorial dan kepulauan serta 238.807 km<sup>2</sup> berupa perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE), dengan panjang garis pantai mencapai 2.666,3 km. Oleh karena itu, sektor kelautan dan perikanan menjadi sektor unggulan yang akan memberikan kontribusi besar pada pembangunan Provinsi Aceh, apabila pemanfaatannya dilakukan secara optimal.

Persoalan mendasar kita, antara lain mayoritas kegiatan usaha ekonomi perikanan umumnya dikerjakan secara tradisional (khususnya perikanan budidaya tambak), belum menerapkan IPTEK dan manajemen yang profesional. Inilah yang menyebabkan sebagian besar nelayan dan pembudidaya ikan di Aceh masih berada di bawah garis kemiskinan dan juga produktivitas hasil budidaya (ikan, udang dan rumput laut) yang rendah.

Untuk dapat membangun sektor ekonomi dan unit bisnis kelautan yang berkelanjutan dalam praktiknya seyogianya menerapkan prinsip-prinsip seperti setiap usaha harus memenuhi skala ekonominya, menggunakan *integrated supply chain management system* berbasis inovasi, dan penguatan dan penguatan industri hulu dan hilir. Melakukan pembangunan ramah lingkungan yang berkelanjutan, kerjasama sinergis antar sektor dan unit usaha, serta pembangunan kluster ekonomi kelautan.

Oleh karena itu diperlukan perencanaan pembangunan yang cermat dan berhasil guna, berupa informasi yang lengkap dan akurat. Dalam hal ini informasi dari masyarakat kelompok sasaran merupakan hal yang paling mendasar yang harus ditanggapi dan dipertimbangkan. Dengan demikian upaya pembangunan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kelompok sasaran sebagai upaya untuk

kepentingan mereka dan akan mendorong berkembangnya partisipasi aktif dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan tersebut.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dimana Renja sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah yang memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Aceh sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Aceh menyusun dokumen Rencana Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2023.

Sehubungan dengan itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, sebagai salah satu instansi membuat dan menyusun dokumen perencanaan dalam periode 1 (satu) tahunan berupa dokumen Rencana Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Rencana awal Renja SKPA tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017-2022 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
9. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
14. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

15. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
16. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Presiden No 05 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
19. INPRES No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, yang berisikan Pedoman dalam rangka memantapkan manajemen pemerintah dan pembangunan yang akuntabel dan terwujudnya GOOD GOVERNMENT;
20. Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
23. Qanun Aceh No. 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017 – 2022.
24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Aceh.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 adalah:

1. Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh;
2. Menjabarkan rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh jangka pendek 1 (satu) tahun untuk tahun 2023;
3. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2023 adalah:

1. Kerangka acuan dalam penyusunan RKA-PD Tahun 2023;
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

### **1.4 Sistematika Penyusunan**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh tahun 2023 menggunakan sistematika yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

BAB I :Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II :Hasil Evaluasi Renja Perangkat Aceh Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Aceh tahun lalu dan Renstra Perangkat Aceh Tahun 2017-2022
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Aceh
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPA

**BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran perangkat Aceh
- 3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Aceh**

**BAB V :Penutup.**

## BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT ACEH TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Aceh tahun lalu dan Renstra Perangkat Aceh Tahun 2017-2022

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh ini menyajikan dasar pengukuran kinerja program/kegiatan dan Pengukuran kinerja berdasarkan sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023.

Pengukuran kinerja program/kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran terhadap Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan melalui tahapan sebagai berikut :

#### a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Hasil	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (ton)	108.045,79	107.309,23	99,32

Capaian produksi perikanan budidaya pada tahun 2021 sebesar 107.309,24 ton dan jika dibandingkan dengan target pada tahun 2020 yakni sebesar 108.045,79,24 ton maka capaian produksi perikanan budidaya adalah sebesar 99,32%. Produksi perikanan budidaya tahun 2020 meningkat sebesar 5,38 persen dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 101.529,57 ton dan kenaikan 7,24% dari tahun 2019. Produksi perikanan

budidaya tahun 2021 berdasarkan komoditas utama menunjukkan komoditas udang mencapai 42.239,06 ton, lele mencapai 19.598,21 ton, bandeng mencapai 16.101,71 ton, nila mencapai 13.590,24 ton, mas mencapai 9.096,21 ton, kerapu mencapai 2.415,24 ton, belanak mencapai 2.112,47 ton, patin mencapai 480,82 ton dan ikan lainnya mencapai 1.675 ton. Pertumbuhan perikanan budidaya berdasarkan komoditas utama dalam kurun waktu 2018-2029 dan tahun 2020-2021 menunjukkan bahwa produksi perikanan budidaya di Aceh secara total mengalami peningkatan.

Belum tercapainya produksi perikanan budidaya dari target tahun 2020 antara lain disebabkan oleh perubahan cuaca yang masih ekstrem dan terjadi banjir di beberapa daerah sentra produksi.

Pencapaian volume produksi perikanan budidaya secara keseluruhan untuk semua komoditas utama didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pengembangan teknologi budidaya secara intensifikasi dengan bioflok dan dengan adanya usaha pembinaan pakan mandiri sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi;
- meningkatnya kapasitas Unit Perbenihan Rakyat (UPR) dalam menyediakan benih yang unggul;
- bantuan pemerintah berupa revitalisasi lahan tambak dan kolam, benih dan pakan, alat produksi budidaya dan lainnya yang dipusatkan berdasarkan pada pengembangan kawasan komoditas unggulan klaster perikanan budidaya;
- Nilai ekonomis komoditas ikan yang cukup tinggi seperti ikan bandeng, nila, mas, kerapu, dan udang maka pemasarannya masih cukup terbuka.

#### b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Realisasi produksi perikanan tangkap dilaporkan secara berkala setiap triwulanan, dan capaian tahun 2021 adalah sebanyak 209.174,39 ton atau mencapai 101,67% dari target tahun 2020 yaitu sebesar 205.741,00 ton. Volume produksi perikanan tangkap tersebut berasal dari 97,00% produksi perikanan tangkap di laut

yaitu sebesar 202.899,15 ton dan sisanya sebesar 3,00% atau mencapai 6.275,24 ton berasal dari Perairan Umum Daratan (PUD).

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Hasil	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (ton)	205.741,00	209174,39	101,67

Produksi perikanan tangkap di laut tahun 2021 berdasarkan komoditas utama menunjukkan komoditas tuna/cakalang/tongkol mencapai 110.869,15 ton, kakap mencapai 20.625,58 ton, kembung mencapai 8.821,34 ton, tenggiri mencapai 9.655,25 ton, selar mencapai 18.227,88 ton, rajungan dan kepiting mencapai 9.444,13 ton, lobster mencapai 4.475,94 ton dan komoditas lainnya mencapai 20.779,68 ton, sedangkan pada perikanan tangkap PUD terdiri dari komoditas ikan 4.531,37 ton, udang 1.734,14 ton, dan jenis lainnya mencapai 9,73 ton. Pertumbuhan perikanan tangkap di laut dan perairan umum berdasarkan komoditas utama dalam kurun waktu 2017-2020 menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap Aceh secara total mengalami peningkatan yang fluktuatif, dari triwulan I hingga triwulan IV tahun 2020.

Peningkatan volume produksi perikanan tangkap, disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- Perbaikan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di beberapa lokasi;
- bantuan alat tangkap yang terus berlanjut serta bantuan hibah langsung ke kelompok nelayan berupa sarana alat bantu penangkapan ikan seperti alat tangkap jaring gillnet, rumpom laut dalam, GPS, lampu celup, fish finder dan mesin kapal;
- Tindakan tegas terhadap kapal-kapal IUU fishing menyebabkan jalur migrasi ikan yang selama ini tertahan dapat diakses oleh nelayan lokal, sehingga menumbuhkan fishing ground baru atau peningkatan jumlah tangkapan di fishing ground yang lama; dan

- Sistem perijinan yang lebih mudah.

Untuk memacu peningkatan volume produksi perikanan tangkap, ke depan perlu dilakukan upaya dan kegiatan antara lain optimalisasi operasional bantuan sarana penangkapan ikan, percepatan pembangunan pelabuhan PPI P3D, peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, Optimalisasi pendataan produksi perikanan tangkap di pusat-pusat pendaratan termasuk tangkahan, Penguatan pendataan dan penambahan SDM pengumpulan data di area WPP 571 dan WPP 572.

### c. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Nilai ekspor perikanan adalah jumlah komoditas produk perikanan, baik hidup, segar, dingin, maupun olahan yang dijual ke luar negeri yang dikonversi dalam bentuk uang (US Dollar). Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh.

Pada tahun 2021, realisasi nilai ekspor perikanan sebesar 2,9 juta USD atau telah mencapai 91,89% dari target tahun 2021 yaitu sebesar 3,2 juta USD. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu sebesar 4,4 juta USD, capaian tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 32,25%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target 2022 pada dokumen Renstra DKP Aceh 2018-2022 yaitu sebesar 4,5 juta USD, realisasi tahun 2020 baru mencapai 65,61%. Dengan demikian diperlukan kerja keras untuk dapat mencapai target ekspor di tahun 2021.

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Hasil	1. Meningkatnya nilai ekspor perikanan (USD)	3.250.000	2.986.439	91,81

Terdapat lima komoditas penyumbang terbesar nilai ekspor hasil perikanan tahun 2020 yaitu (tuna,tongkol,cakalang) mencapai 1,5 juta USD (51,00%), udang dan

kepiting mencapai 1,1 juta USD (40,08%), kerapu sebesar 208 ribu USD (6,98%), dan lobster sebesar 57 ribu USD (1,94%).

Salah satu penyebab tidak tercapainya nilai ekspor perikanan tahun 2020 dikarenakan terjadi penurunan produksi perikanan tangkap dari komoditas utama seperti ikan tuna dan cakalang, sehingga mempengaruhi volume ekspor hasil perikanan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan guna meningkatkan capaian nilai ekspor antara lain :

- Peningkatan mutu produk kelautan dan perikanan untuk komoditas ekspor yang bernilai ekonomis penting seperti udang, tuna, rajungan dll melalui pengembangan sistem rantai dingin, sertifikasi mutu, dan pemenuhan persyaratan dari negara pengimpor;
- Pengembangan diversifikasi dan penguatan branding produk hasil perikanan;
- Berpartisipasi aktif dalam kerjasama dengan organisasi perdagangan internasional dan pemerintah negara tujuan ekspor dalam rangka peningkatan akses pasar produk perikanan;
- Partisipasi aktif dalam pameran di pusat-pusat pasar produk hasil perikanan dalam maupun luar negeri;
- Pemberantasan illegal fishing sehingga nelayan lokal mampu meningkatkan hasil tangkapan ikan.

#### d. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Konsistensi dokumen perencanaan belum terpenuhi diakibatkan oleh belum tepatnya penyelesaian penyusunan program tepat waktu, seperti pengesahan dokumen anggaran yang melebihi waktu yang ditetapkan.

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Hasil	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan	80	80	100,00

	pembangunan ekonomi Aceh (%)			
--	------------------------------	--	--	--

e. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan pulau-pulau kecil.

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Hasil	Berkurangnya jumlah KK miskin di pesisir dan pulau-pulau kecil (KK)	50	40	80

Pada tahun 2021, jumlah keluarga miskin dapat dikurangi dengan dilakukan pembinaan dan bantuan modal usaha. Sasaran keluarga yang dibina dan dibantu dari pelaku usaha garam yang tersebar di Kab. Aceh Besar, Aceh Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara dan Aceh Timur. Selain itu, kelompok nelayan dan pembudidaya ikan di pulau simeulue dan palau banyak. Persentase outcome yang dicapai hanya 80%, penyebab tidak tercapainya outcome ini adalah terjadi perubahan anggaran yang penyelesaiannya pada November 2020, sehingga kegiatan yang telah ditetapkan tidak dapat di realisasikan karena waktu mencukupi.

f. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Hasil	1. Luas Kawasan Konservasi Laut (Ha)	145.237,77	149.228,57	102,75
	2. Persentase penyelesaian kasus IUU Fishing yang tepat Waktu (%)	100	100	100

Target luas kawasan konservasi pada tahun 2021 sejumlah 145.237,77 ha dan target akhir renstra tahun 2022 adalah 281.100 ha, target luas kawasan konservasi mengalami peningkatan setiap tahunnya dibandingkan target tahun 2017 (68.442,81 ha) dan tahun 2018 (77.856,66 ha), dengan realisasi sebesar 149.228,57 ha atau sebesar 102,75% dari target di tahun 2019. Sedangkan Indikator persentase penyelesaian kasus pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan perijinan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan. Pada tahun 2021 telah mencapai target, yakni realisasinya mencapai 100% dari target sebesar 100% atau dari kasus yang ditemukan sebanyak 2 kasus dan dapat diselesaikan keduanya oleh tim pengawasan perikanan DKP Aceh.

Pada tahun 2021 terdapat kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang termasuk golongan ringan yaitu berupa pelanggaran administrasi. Dari kasus tersebut, Sebanyak 2 kasus yang direkomendasikan untuk diberikan pembinaan/sanksi administrasi. Hal ini, dikarekan bentuk pelanggaran yang dilakukan berupa tidak memiliki dokumen kapal lengkap sesuai dengan ketentuan kelayakan berlayar terutama dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Kegiatan pendukung utama yang telah dilakukan meliputi: (1) pembinaan teknis pengawasan penangkapan ikan, (2) monitoring dan evaluasi ketaatan kapal melalui Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) dan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan yang beroperasi di WPP 571 dan WPP 572.

Dampak dengan bebasnya perairan aceh dari kegiatan Illegal Fishing dapat dilihat dengan terus meningkatnya produksi perikanan tangkap dan meningkatnya nilai ekspor perikanan yang produksinya disumbangkan oleh produk perikanan tangkap. Untuk lebih jelas hasil pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C 2.9. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 (tahun berjalan n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)			
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)		
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran (%)	95	0	0	0	95	0	0	
3	25	01	1,01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh (%)	100	0	0	0	100	0	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 (tahun berjalan n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)				
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
3	25	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan (Dokumen)	10	0	0	0	10	0	0
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>1,02</b>		<b>Administrasi Keuangan</b>	<b>Meningkatnya Kinerja ASN (orang)</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	25	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	12	0	0	0	12	0	0
3	25	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	12	0	0	0	12	0	0
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>1,05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	25	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian Dinas beserta Perlengkapannya (setel)	1108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 (tahun berjalan n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)					
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
3	25	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan perangkat daerah (%)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
3	25	01	1,06	01	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0
3	25	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0
3	25	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor (bulan)	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0
3	25	01	1,06	05	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 (tahun berjalan n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)					
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
3	25	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (bulan)	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0
3	25	01	1,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (bulan)</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3	25	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat DKP Aceh (bulan)	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	25	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedia komunikasi, sumberdaya air dan listrik (bulan)	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	25	01	1,08	03	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 (tahun berjalan n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)				
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
3	25	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor (bulan)	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	25	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah (unit)	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	25	01	1,03	05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (bulan)	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	25	01	1,03	18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor (SKPA)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 (tahun berjalan n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)					
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase kawasan konservasi yang dikelola (%)	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	61,53846154
3	25	02	1,01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah ruang laut Aceh di Kab/Kota sampai dengan 12 mil yang dikelola (kab/kota)	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	11,11
3	25	02	1,01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K rencana pengelolaan wilayah pesisir (dokumen)	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	11,11

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 (tahun berjalan n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)					
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
3	25	02	1,01	02	Pengelola Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkelola (Ha)	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	14,29
3	25	02	1,01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah dokumen luasan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (dokumen)	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	28,57
3	25	02	1,03		Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang terampil (orang)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	17,50
3	25	02	1,03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat kapasitasnya (orang)	200,00	-	-	-	0,00	35,00	35,00	17,50

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 (tahun berjalan n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)					
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
3	25	02	1,03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang menghasilkan benih unggul (unit;kumulatif)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	25	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Produksi perikanan tangkap (ton)</b>	271.036,94	0	0	0	0	237.214,46	237.214	87,52%
3	25	03	1,01		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>	<b>Jumlah persentase pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut Aceh (%)</b>	100,00	0	0	0	0	100,00	100	100,00%
3	25	03	1,01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (dokumen)	10,00	-	-	-	0,00%	4,00	4,00	40,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 (tahun berjalan n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)					
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
3	25	03	1,01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 (unit) Mil	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00%
3	25	03	1,01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)	800,00	-	-	-	0,00%	200,00	200,00	25,00%
3	25	03	1,02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah persentase pengelolaan penangkapan ikan di wilayah Perairan Umum daratan Aceh (%)	100,00	-	-	-	0,00%	100,00	100,00	100,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 (tahun berjalan n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)					
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
3	25	03	1,02	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (dokumen)	5,00	-	-	-	0,00%	5,00	5,00	100,00%
3	25	03	1,06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah pembangunan dan pengelolaan pelabuhan provinsi (lokasi)	31,00	-	-	-	0,00%	8,00	8,00	25,81%
3	25	03	1,06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Tersedianya sarana dan prasarana pada Pelabuhan Perikanan (lokasi)	31,00	-	-	-	0,00%	8,00	8,00	25,81%
3	25	03	1,06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Tersedianya pelayanan pelabuhan perikanan (bulan)	12,00	-	-	-	0,00%	12	12,00	100,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 (tahun berjalan n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)					
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	100,00	-	-	-	0,00%	97,54	97,54	97,54%
3	25	04	1,05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya yang dibantu (RTP)	3.200,00	-	-	-	0,00%	800	800	25,00%
3	25	04	1,05	01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Pengembangan sarana dan prasarana UPT Daerah Balai Benih Ikan pantai (unit; non kumulatif)	2,00	-	-	-	0,00%	2	2	100,00%
3	25	04	1,05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Produksi calon induk unggul air tawar (Ekor; kumulatif)	4,00	-	-	-	0,00%	4	4	100,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 (tahun berjalan n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)				
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
3	25	04	1,05	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Produksi benih unggul (juta ekor; non kumulatif)	148	-	-	0,00%	37	37	25,00%
3	25	04	1,05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok budidaya yang dibina dan difasilitasi (kelompok: kumulatif)	148,00	-	-	0,00%	37,00	37	25,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 (tahun berjalan n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)				
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
3	25	04	1,05	07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah pembudidaya ikan di kawasan konservasi yang dibina (orang)	130,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3	25	05			<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)</b>	70,00	-	-	0,00%	62,00	62	88,57%
3	25	05	1,01		<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil</b>	<b>Jumlah Kabupaten/Kotayang diawasi Sumber DayaPerikanannya (Kab/Kota)</b>	18,00	-	-	0,00%	18,00	18	100,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 (tahun berjalan n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)				
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
3	25	05	1,01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah hari patroli pengawasan SDKP (hari)	160,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3	25	05	1,01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Kasus Pelanggaran Tindak Pidana Perikanan yang terselesaikan (kasus)	16,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3	25	05	1,01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terbina dan terevaluasinya POKMASWAS (Kelompok)	75,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 (tahun berjalan n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)					
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
3	25	05	1,02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang diawasi Sumber Daya Perikanan (Kab/Kota)	23,00	-	-	-	0,00%	23,00	23	100,00%
3	25	05	1,02	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan di Wilayah Perairan Daratan yang diawasi (pelaku usaha)	57,00	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 (tahun berjalan n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)				
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
3	25	05	1,02	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah pelaku usaha pembudidaya dan pembenihan ikan yang diawasi (pelaku usaha)	30,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3	25	05	1,02	03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang diawasi (pelaku usaha)	40,00	-	-	0,00%	10	10	25,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 (tahun berjalan n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	25	06								
3	25	06	1,02							
3	25	06	1,02	01						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023 (tahun berjalan n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)					
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
3	25	06	1,03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terpenuhinya bahan bakuperikanan dikabupaten/kota (lokasi)	23,00	-	-	-	0,00%	23	23	100,00%
3	25	06	1,03	01	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Poklahsar yang dibina (kelompok)	150,00	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat realisasi capaian kinerja berdasarkan indikator pelayanan daerah dapat dilihat pada tabel T-C 3.0 berikut.

Tabel T-C 3.0. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD (Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh)

No	Indikator	SPM/ Stan dar Nasio nal	IKK	Target Renstra SKPA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catat an Anali sis
				2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)			102,50	103,00	103,50	104,00	102,50	-	102,50	103,00	
2	Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)			97,54	98,04	98,74	100,00	97,54	-	97,54	98,04	
3	Produksi Perikanan (Ton)			350.131,21	363.572,58	377.013,95	390.455,32	350.131,21	-	350.131,21	363.572,58	
a	- Produksi Perikanan Tangkap (ton)			237.214,46	248.488,62	259.762,78	271.036,94	237.214,46	-	237.214,46	248.488,62	
b	- Produksi Perikanan Budidaya (ton)			112.916,75	115.083,96	117.251,17	119.418,38	112.916,75	-	112.916,75	115.083,96	
4	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh (%)			5,30	5,35	5,40	5,45	5,30	-	5,30	5,35	
5	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)			59,37	59,42	59,47	59,52	59,37	-	59,37	59,42	
6	Nilai Ekspor Perikanan (USD)			2.153.806,00	2.256.368,00	2.358.931,00	2.461.493,00	2.153.806,00	-	2.153.806,00	2.256.368,00	
7	Produksi Garam (Ton)			10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	10.600,00	-	10.600,00	10.700,00	
8	Persentase Kawasan konservasi yang			40,00	50,00	60,00	65,00	40,00	-	40,00	50,00	

No	Indikator	SPM/ Stan dar Nasio nal	IKK	Target Renstra SKPA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catat an Anali sis
				2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	dikelola (%)											
9	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku (%)			62,00	63,00	65,00	70,00	62,00	-	62,00	63,00	

Capaian kinerja secara pada tahun 2021 telah menunjukkan capaian sebagaimana yang diharapkan. Dari 6 Sasaran Strategis (SS) terdapat 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, dari 7 indikator tersebut terdapat 5 yang capaiannya  $\geq 100\%$ , yaitu Nilai Tukar Nelayan, Nilai Tukar Pembudidaya, konsumsi ikan, kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh, produksi perikanan, dan nilai ekspor perikanan. Untuk indikator kinerja utama yang belum tercapai sebanyak 2 indikator yaitu produksi garam dan Luas kawasan konservasi perairan. Namun demikian, jika ditelusuri lebih lanjut, indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang mengalami kecenderungan positif/kenaikan dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya.

### **1.2.1. Kajian dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Daerah**

Analisis capaian kinerja DKP Aceh tiap Sasaran Strategis untuk setiap indikator kinerja utama untuk menjelaskan permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan kedepan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan SKPA. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **A. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan**

Capaian kinerja secara pada tahun 2021 telah menunjukkan capaian sebagaimana yang diharapkan. Dari 6 Sasaran Strategis (SS) terdapat 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, dari 7 indikator tersebut terdapat 3 yang capaiannya  $\geq 100\%$  (bernotifikasi hijau), yaitu konsumsi ikan, kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh dan nilai ekspor perikanan. Untuk indikator kinerja utama yang tidak tercapai di tahun 2020 (bernotifikas kuning) sebanyak 3 indikator antara lain : nilai tukar nelayan, nilai tukar pembudidaya ikan, produksi perikanan dan 2 indikator yang masih bernotifikasi merah yaitu produksi garam dan Luas kawasan konservasi perairan. Namun demikian, jika ditelusuri lebih

lanjut, terdapat beberapa indikator kinerja utama Dinas yang mengalami kecenderungan positif/kenaikan dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya.

### **3.2. Analisa dan Evaluasi Kinerja**

Analisis capaian kinerja DKP Aceh tiap Sasaran Strategis untuk setiap indikator kinerja utama untuk menjelaskan permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan kedepan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan SKPA. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **A. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan**

Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan kemakmuran rakyat Aceh, dalam kaitan ini DKP Aceh senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders kelautan dan perikanan, yakni nelayan dan pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya sehingga mampu meningkatkan pendapatannya. Pendapatan merupakan total pendapatan per orang nelayan/pembudidaya yang dari aktivitas penangkapan ikan atau budidaya yang diperoleh dari hasil penjualan dan tangkapan/produksi setelah dikurangi modal kerja diperoleh dalam 1 (satu) bulan.

Sasaran strategis meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan, memiliki dua IKU (Indikator Kinerja Utama), yakni Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi).

Nilai Tukar diperoleh dari perbandingan indeks harga hasil produksi yang dijual oleh nelayan/pembudidaya ikan (It) terhadap indeks harga biaya operasional produksi nelayan/pembudidaya ikan (Ib). Nilai Tukar menunjukkan kemampuan daya tukar dari produk perikanan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi, juga dapat digunakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli nelayan/pembudidaya ikan. Nilai tukar dirumuskan jika lebih dari 100, berarti nelayan memperoleh pendapatan lebih besar dari pengeluarannya, dan

sebaliknya, apabila Nilai Tukar kurang dari 100, maka artinya pengeluaran nelayan untuk biaya rumah tangga dan produksi, lebih besar dari uang yang diperoleh dari menjual ikannya. Semakin tinggi Nilai Tukar, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli nelayan/pembudidaya ikan, oleh sebab itu Nilai Tukar bisa dipergunakan sebagai indikator dini tingkat kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan. Apabila dilihat dari capaiannya ditahun 2021, maka capaian Nilai Tukar di atas angka 100 dan mencapai target tahun 2021, begitu juga Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) berada di atas angka 100 dan telah melampaui target tahun 2021.

Beberapa faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar antara lain adalah hasil produksi perikanan dalam waktu berjalan, harga komoditi produksi perikanan yang dihasilkan pada waktu berjalan, pengeluaran/ongkos yang dikeluarkan untuk memproduksi komoditi perikanan, harga barang/jasa konsumsi untuk memproduksi produk/komoditas perikanan, pengeluaran/ongkos yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari, serta faktor harga ikan yang tidak mudah dikontrol dan dipengaruhi oleh situasi pasar.

### **IKU 1. Nilai Tukar Nelayan (NTN)**

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur pendapatan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Angka capaian NTN diperoleh dari Badan Pusat Statistik Aceh yang diolah oleh DKP Aceh. Realisasi NTN selama tiga tahun terakhir dari tahun 2018-2021 mengalami fluktuatif yaitu pada tahun 2018 sebesar 101,87, tahun 2019 sebesar 101,90, tahun 2020 sebesar 97,48 dan tahun 2021 sebesar 105,07 atau mencapai 102,01% dari target yang telah ditetapkan di tahun 2021 yaitu sebesar 103,00.

TABEL 3.2. **PERKEMBANGAN CAPAIAN NTN TAHUN 2018-2021**

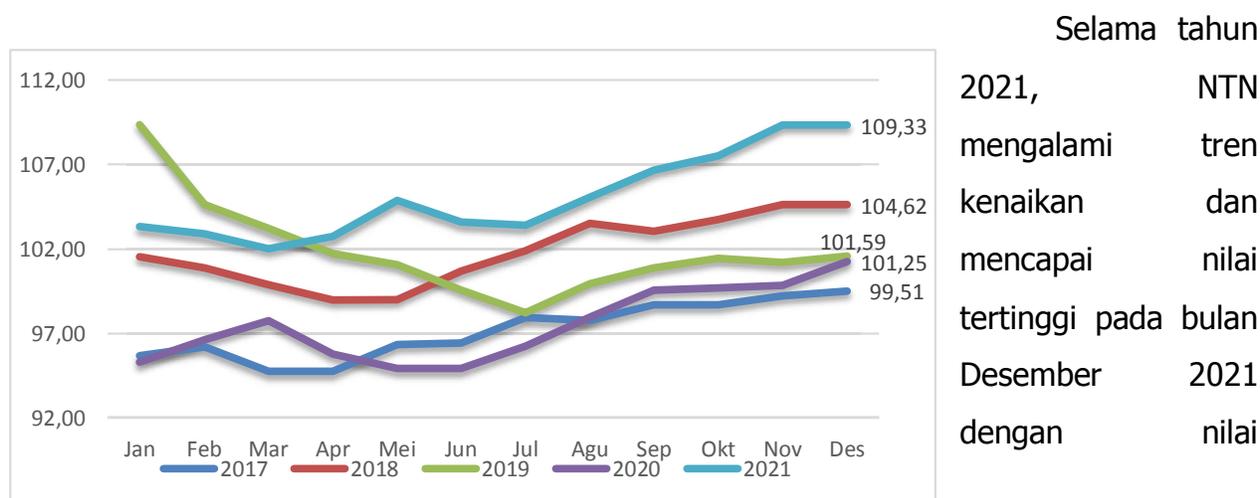
Sasaran Strategis-1			Meningkatkan Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya Ikan					
IKU-1			Nilai Tukar Nelayan (NTN)					
REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	2021			% KENAIKAN 2018-2021	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN 2018-2022
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN			
101,87	101,90	97,48	103,00	105,07	102,01	-2,36	106,00	99,12

Sumber : BPS Aceh, 2021 (diolah DKP Aceh)

Naiknya Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari 97,48 pada tahun 2020 menjadi 105,07 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan yang semakin meningkat. Keberhasilan pencapaian target Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan dampak peningkatan volume dan nilai produksi perikanan tangkap yang dinikmati oleh nelayan, selain itu juga dipengaruhi oleh terlaksananya bantuan pemerintah dalam menangani wabah covid-19.

Persentase kenaikan Pertumbuhan NTN selama 4 tahun terakhir mengalami perlambatan sebesar 2,36 persen, disebabkan masih terjadinya wabah covid-19 tahun 2020 yang mengakibatkan penurunan nilai NTN pada tahun tersebut. dan dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2022 yang besarnya 106, maka capaian tahun 2021 telah mencapai sebesar 99,12 persen.

GAMBAR 3.1. **PERKEMBANGAN NILAI TUKAR NELAYAN (NTN) PER BULAN SELAMA TAHUN 2017-2021**



mencapai 109,33. Tren naiknya NTN disebabkan naiknya indeks pendapatan nelayan yang disebabkan mulai terjadinya musim ikan. Sedangkan nilai terendah terjadi pada bulan Maret 2021 yaitu sebesar 102,02 yang dipengaruhi oleh faktor cuaca. Nilai Tukar Nelayan (NTN) selama empat tahun terakhir (2017 s.d 2021) menunjukkan realisasi yang fluktuatif dengan tren sebagai berikut, dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 5,1%, tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 3%, tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami juga mengalami penurunan yang tidak signifikan sebesar 0,3% dan tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penumbuhan sebesar 7,9%. Jika dibandingkan dengan target NTN sampai akhir Renstra tahun 2022 sebesar 106, posisi capaian tahun 2021 sudah mencapai 99,12%.

Tercapainya target NTN tahun 2021 dikarekan adanya stimulus bantuan ekonomi dalam penanganan efek pandemi covid-19 yang menyebabkan meningkatnya daya beli dari nelayan. Selain itu, juga dipacu oleh penambahan volume dan nilai produksi perikanan tangkap. Disaat yang bersamaan biaya yang harus dikeluarkan oleh nelayan cenderung stabil untuk memenuhi kebutuhan pokok yang dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Sedangkan untuk komponen barang produksi dan penambahan barang modal dapat ditekan dengan adanya pembangunan infrastruktur yang mendukung kemudahan akses nelayan terhadap BBM, air/es dan penanganan pasca panen seperti tersedianya cold storage.

Upaya yang telah dilakukan oleh DKP Aceh untuk meningkatkan NTN sebesar 106 pada tahun 2022 yaitu terus meningkatkan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di beberapa lokasi pelabuhan perikanan yang tersebar di beberapa kabupaten kota. Selain itu, juga diberikan bantuan alat tangkap dan armada penangkapan kepada kelompok nelayan seperti rumpon, jaring, mesin dan GPS, sehingga diharapkan mampu meningkatkan produksi perikanan tangkap yang dapat meningkatkan pendapatan nelayan.

## **IKU 2. Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)**

Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) merupakan alat ukur pendapatan pembudidaya yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh

pembudidaya dengan harga yang dibayarkan oleh pembudidaya. Angka capaian NTPi diperoleh dari Badan Pusat Statistik Aceh yang diolah oleh DKP Aceh.

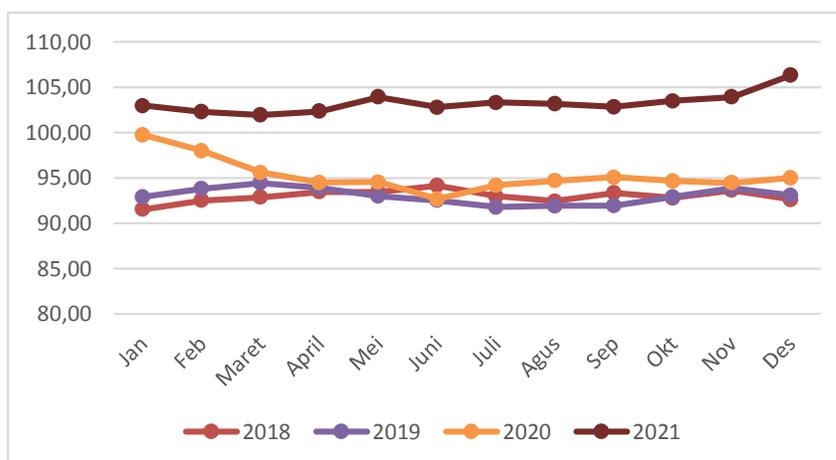
**TABEL 3.3. PERKEMBANGAN CAPAIAN NTPi TAHUN 2018-2021**

Sasaran Strategis-1			Meningkatkan Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya Ikan					
IKU-2			Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)					
REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	2021			% KENAIKAN 2018-2021	TARGET AKHIR RENSTRA	(% ) CAPAIAN 2018-2022
			TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN			
92,96	92,99	95,24	101,00	103,26	102,24	4,56	103,00	100,25

*Sumber : BPS Aceh, 2021 (diolah DKP Aceh)*

Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) pada tahun 2021 mencapai sebesar 103,26 atau sebesar 102,24 persen dari target. Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2022 yang besarnya 103, maka capaian tahun 2021 sudah mencapai target 100,25 persen. Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2020 yang capaiannya 95,24 hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar 8,42 persen. tercapainya target NTPi tahun 2021 disebabkan karena karena peningkatan margin keuntungan penjualan ikan juga disertai peningkatan volume produksi. Selain itu, juga dipicu Bibit/benih dan pakan adalah dua komponen ini yang cukup berpengaruh dan telah diintervensi pemerintah dalam bentuk bantuan pada klaster perikanan budidaya unggulan.

**GAMBAR 3.3. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PEMBUDIDAYA IKAN (NTPi) SELAMA TAHUN 2018-2021**



Secara rata-rata NTPi tumbuh sebesar 4,56 persen selama tahun 2021, sehingga meningkat dari nilai 102,92 pada Januari menjadi 106,30 pada

Desember 2021. Pada bulan Januari - Desember tahun 2021 secara rata-rata Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) sebesar 103,26. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan tahun 2021 berada di atas 100. Selama tahun 2021, NTPI tertinggi berada pada bulan Desember yaitu sebesar 106,30 dan terendah berada pada bulan Maret yaitu sebesar 101,92. Dalam kondisi saat ini yang dapat dilakukan guna menjaga indeks NTPI adalah menjaga produktivitas pembudidaya sekaligus menjaga harga komoditas ditingkat pembudidaya tidak turun atau bahkan bisa naik dan menekan biaya yang di keluarkan oleh pembudidaya.

Penyebab terus membaiknya nilai NTPI ini salah satunya disebabkan oleh kebijakan bantuan pemerintah dalam pakan, bioflok, bantuan benih dan induk unggul, bantuan prasarana dan kebijakan lainnya yang menjadi pemicu naiknya harga jual ikan budidaya dan menekan biaya produksi perikanan budidaya.

Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh akan terus berupaya meningkatkan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI), melalui pelaksanaan kebijakan yang bersifat afirmatif dan pemberian bantuan pemerintah sebagai salah satu stimulan bagi para pembudidaya serta memperluas akses permodalan bagi usaha budidaya diantaranya melalui (a) bantuan benih unggul (b) pengembangan pakan mandiri melalui penyediaan mesin pellet, dan pembinaan kepembudidaya dan memperbanyak percontohan untuk budidaya pakan mandiri seperti cacing darah, cacing sutra yang diharapkan dapat mengurangi biaya penggunaan pakan; (c) pengembangan teknologi bioflok untuk menekan Food Conversion Ratio/FCR guna meningkatkan efisiensi pakan dan produktivitas perikanan budidaya.

## **B. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan**

### **IKU 3. Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)**

Meningkatnya produksi ikan Aceh telah mendorong meningkatnya ketersediaan ikan untuk konsumsi daerah. Presiden juga telah memerintahkan para Menteri untuk

mengkampanyekan gemar makan ikan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Sehat, dengan melibatkan seluruh komponen/elemen bangsa dengan membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). DKP Aceh dalam berbagai kesempatan juga terus mengkampanyekan gemar makan ikan kepada anak-anak dan ibu hamil dalam rangka memberikan kualitas kehidupan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Memastikan penyediaan bahan makanan yang mengandung protein ikan dapat dilihat jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan neraca permintaan ikan untuk konsumsi domestik dalam pemenuhan kebutuhan bahan makanan protein ikan. Dalam hal ini, DKP Aceh menghitung Angka Konsumsi Ikan berdasarkan data yang diterbitkan oleh BPS, dengan komponen yang dihitung mencakup konsumsi dalam rumah tangga (ikan dan udang segar/basah, ikan dan udang awetan dan makanan jadi), konsumsi di luar rumah tangga (konsumsi di restoran, rumah makan, hotel, rumah sakit, dan sekolah), dan konsumsi ikan olahan seperti baso ikan, nugget, somay, pempek, kerupuk ikan, ikan kayu dll.

**TABEL 3.4. CAPAIAN ANGKA KONSUMSI IKAN TAHUN 2018-2021**

Sasaran Strategis-2			Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Penyediaan Bahan Makanan Protein Ikan					
IKU-3			Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)					
REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	2021			% KENAIKAN 2018-2021	TARGET AKHIR RENSTRA	(% CAPAIAN 2018-2022)
			TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN			
57,89	58,97	59,32	56,96	60,07	105,46	2,77	58,64	102,44

*Sumber : BPS Aceh, 2021 (diolah DKP Aceh)*

Capaian Angka Konsumsi Ikan tahun 2021 adalah 60,07 kg/kapita/tahun, atau naik 1,26% dibandingkan dengan capaian tahun 2020, yang besarnya 59,32 kg/kapita/tahun. Capaian tahun 2021 telah memenuhi target sebesar 56,96 kg/kapita/tahun atau mencapai 105,46% dari target. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kegemaran masyarakat Aceh dalam mengkonsumsi ikan. Selain menunjukkan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap ikan.

Apabila dibandingkan dengan target dalam Renstra DKP Aceh Tahun 2018-2022, yang besarnya 58,64 kg/kapita/tahun, maka capaian tahun 2021 telah melampaui target yaitu 102,44% dari target akhir periode lima tahun. Hal ini juga menunjukkan bahwa produksi perikanan diserap pasar dalam negeri dan industri perikanan bergerak. Untuk meningkatkan angka konsumsi ikan, juga dilakukan promosi peningkatan konsumsi ikan didalam Provinsi Aceh. Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung meningkatkan konsumsi ikan di Aceh antara lain :

- Penguatan melalui kampanye meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kandungan gizi & manfaat ikan, menumbuhkan kreativitas dalam mengolah ikan & usaha kuliner sebagai sumber pendapatan keluarga;
- Meningkatkan keanekaragaman produk olahan hasil perikanan untuk memenuhi tuntutan selera konsumen;
- Kegiatan Sistem Logistik Ikan diharapkan dapat menjamin ketersediaan ikan sepanjang tahun baik di sentra produksi maupun di sentra konsumen/industri dengan mutu baik dan harga stabil;
- Bazar rumah ikan higienis.

Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan konsumsi ikan per kapita daerah adalah :

- Di beberapa wilayah masih kebiasaan masyarakat untuk makan ikan yang rendah;
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi dan manfaat protein ikan bagi kesehatan dan kecerdasan;
- Rendahnya suplai ikan di beberapa wilayah;
- Sarana pemasaran dan distribusi masih terbatas;
- Diversifikasi produk hasil perikanan yang bisa memenuhi tuntutan konsumen masih belum berkembang.

### **C. Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan Aceh**

#### **IKU 4. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh**

Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perikanan adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perikanan. Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan merupakan perubahan PDRB (atas dasar harga berlaku) sektor perikanan dari satu periode ke periode berikutnya. PDRB Perikanan tersebut hanya didasarkan pada sektor primer yang mencakup perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Berdasarkan data BPS, distribusi PDRB sub sektor perikanan atas harga berlaku tahun 2021 adalah sebesar 5,59% atau meningkat 0,02% apabila dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB tahun 2020 yang besarnya 5,57% dan kenaikan rata-rata per tahun 2018-2021 sebesar 9,75%. Realisasi pertumbuhan PDRB sub Perikanan tahun 2021 telah melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 5,23% atau tercapai 106,88% dari target. Apabila dibandingkan dengan target renstra DKP Aceh tahun 2022 sebesar 5,32%, maka pencapaian sudah mencapai 105,08%. Membaiknya capaian PDRB sub sektor perikanan tahun 2021 tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi covid 19 sehingga mampu meningkatkan aktifitas ekonomi sub sektor perikanan. Disisi lain, diikuti dengan peningkatan produksi tangkapan yang melimpah dan meningkatnya permintaan komoditas perikanan.

**TABEL 3.5. CAPAIAN PERTUMBUHAN PDRB SUBSEKTOR PERIKANAN TAHUN 2018-2021**

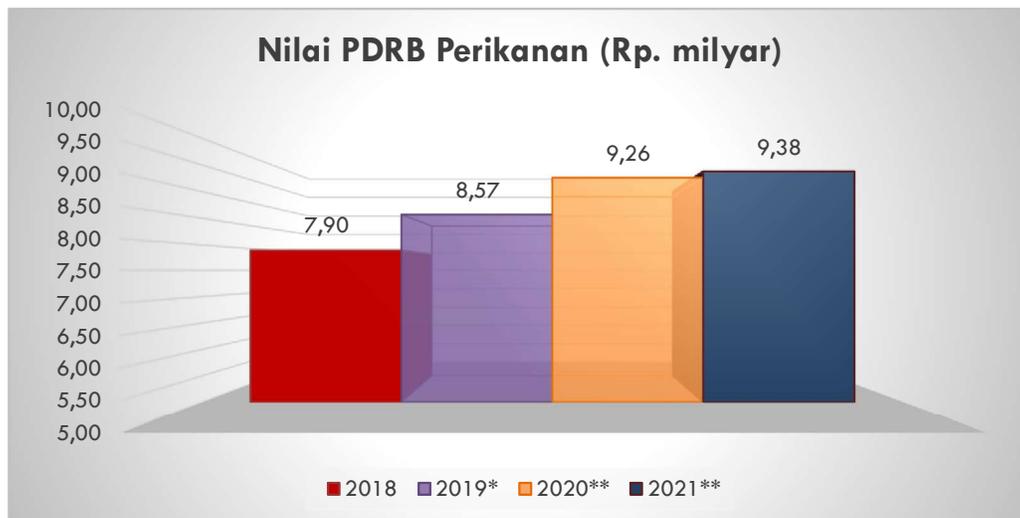
Sasaran Strategis-4			Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan Aceh					
IKU-1			Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh					
REALISASI 2018	REALISASI 2019*	REALISASI 2020*	2021**			% KENAIKAN 2018-2021	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN 2018-2022
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN			
5,07	5,23	5,57	5,23	5,59	106,88	9,75	5,32	105,08

*Sumber : BPS Aceh, 2021 (diolah DKP Aceh); Ket : \* data sementara \*\* data sangat sementara*

Beberapa upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan PDRB antara lain: (1) meningkatkan produksi perikanan budidaya melalui pengembangan budidaya payau, dengan meningkatkan bantuan agroinput benih ikan unggulan dan

pakan, (2) meningkatkan produksi perikanan tangkap dengan meningkatkan bantuan boat/perahu dan alat bantu penangkapan, (3) meningkatkan promosi investasi dibidang kelautan dan perikanan dengan melakukan kerjasama dengan Badan Investasi dan Promosi Aceh serta melakukan bisnis forum dengan stakeholders kelautan dan perikanan, (4) Mendorong sinergi kebijakan dan program dengan pemerintah Kabupaten/Kota untuk peningkatan usaha kelautan dan perikanan baik skala UMKM maupun skala menengah dan besar.

**GAMBAR 3.6. TREND NILAI PDRB PERIKANAN ADHB TAHUN 2016-2021 (Rp. milyar)**



*Sumber : BPS Aceh 2021 (diolah DKP); Ket: \*= Angka sementara, \*\*= Angka sangat sementara*

Apabila dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perikanan atas dasar harga berlaku, maka terdapat peningkatan nilai yakni dari Rp.7,90 milyar pada tahun 2018 menjadi Rp. 9,38 milyar pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya penambahan investasi dan peningkatan penyaluran bantuan permodalan di masyarakat. Selain itu, Besarnya kontribusi sub sektor perikanan juga tidak terlepas dari faktor produksi perikanan yang meningkat dari tahun ke tahun baik produksi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

## D. Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan

### IKU 5. Produksi Perikanan

Jumlah produksi perikanan merupakan gabungan produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Jumlah hasil produksi perikanan budidaya merupakan produksi yang dihasilkan oleh seluruh kabupaten/kota yang meliputi perikanan tawar, payau dan laut, sedangkan untuk jumlah produksi perikanan tangkap berasal dari produksi perikanan tangkap laut dan perairan umum daratan.

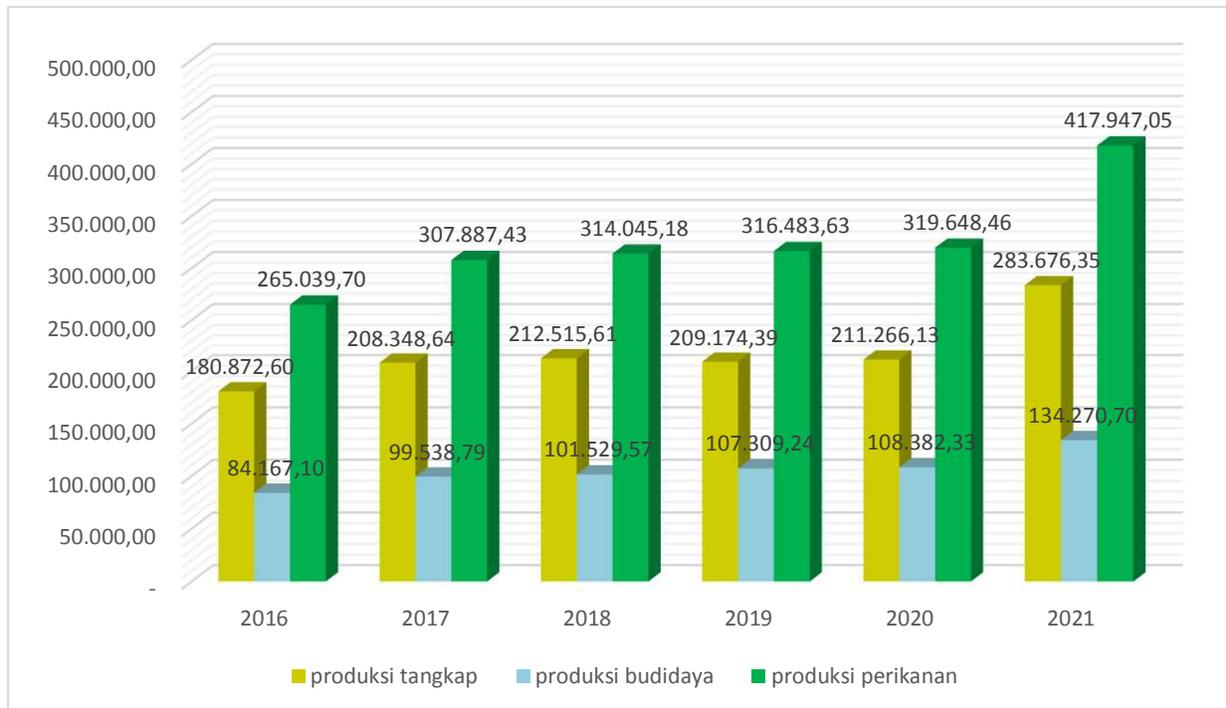
TABEL 3.6. **CAPAIAN PRODUKSI PERIKANAN 2018-2021**

Sasaran Strategis-3			Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan					
IKU-4			Produksi perikanan (ton)					
REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	2021			% KENAIKAN 2018-2021	TARGET AKHIR RENSTRA	(% ) CAPAIAN 2018-2022
			TARGET	REALISASI*	(%) CAPAIAN			
314.045,18	316.483,63	319.648,46	351.429,39	417.947,05	118,93	9,46	370.250,00	112,88

Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2021 (diolah DKP Aceh); Ket : \* data sementara

Produksi perikanan tahun 2021 ditargetkan 351.429,39 ton, dan realisasinya sebesar 417.947,05 ton atau mencapai 118,93%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu sebesar 319.648,46 ton, realisasi tahun 2021 telah mengalami peningkatan sebesar 30,75%, untuk pertumbuhan produksi perikanan selama 4 (empat) tahun 2018-2021 sebesar 9,46%. Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra DKP Aceh tahun 2018-2022 yaitu sebesar 370.250 ton maka realisasi tahun 2021 telah tercapai sebesar 112,88%.

**GAMBAR 3.7. PERKEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN SELAMA TAHUN 2016-2021**



Realisasi produksi perikanan tersebut berasal dari produksi tangkap dan produksi budidaya. Peningkatan produksi tersebut merupakan dampak dari berbagai kebijakan pengelolaan perikanan baik di perikanan tangkap maupun budidaya yang sudah dilakukan oleh DKP Aceh selama tahun 2021.

### 1. Produksi Perikanan Tangkap

Realisasi produksi perikanan tangkap dilaporkan secara berkala setiap triwulanan, dan capaian tahun 2021 adalah sebanyak 283.676,35 ton atau mencapai 127,23% dari target tahun 2021 yaitu sebesar 222.959,09 ton. Volume produksi perikanan tangkap tersebut berasal dari 96,98% produksi perikanan tangkap di laut yaitu sebesar 275.117 ton dan sisanya sebesar 3,02% atau 8.559,73 ton berasal dari tangkapan Perairan Umum Daratan (PUD).

**TABEL 3.7. VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2018-2021 (TON)**

REALISASI			TAHUN 2021*				RENSTRA DKP 2018-2022	
TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2021	TARGET	% CAPAIAN TERHADAP TARGET 2021
208.515,61	209.174,39	211.266,13	222.959,09	283.676,35	127,23	9,88	231.568,00	122,50

*Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2021 (diolah DKP Aceh); Ket : \* data sementara*

Volume produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan rata-rata dari tahun 2018 s.d tahun 2021 dengan periode yang sama sebesar 9,88%, yaitu sebesar 208.515,61 ton pada tahun 2018 menjadi sebesar 283.676,35 ton pada tahun 2021. Kenaikan produksi perikanan tangkap disumbang oleh meningkatnya produksi perikanan laut sebesar 34,25% dan Perairan Umum Daratan sebesar 34,92%. Sedangkan Capaian 2021 terhadap target akhir Renstra 2018-2022 sebesar 231.568,00 ton maka capaian telah melampaui target sebesar 122,50%.

Terjadinya pertumbuhan angka produksi perikanan tangkap adalah terjadinya kelimpahan ikan di beberapa lokasi di berbagai daerah, Cuaca seperti ombak dan angin masih dalam kondisi tenang sehingga mendukung kegiatan penangkapan ikan. Sedangkan dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan, DKP Aceh di tahun 2021 melakukan peningkatan infrastruktur pelabuhan dan pangkalan pendaratan ikan yang merupakan kegiatan prioritas DKP Aceh, perbaikan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di beberapa lokasi, kegiatan tersebut juga telah dapat tercatat dengan baik melalui data statistik perikanan, bantuan alat tangkap yang terus berlanjut serta bantuan hibah langsung ke kelompok nelayan berupa sarana alat bantu penangkapan ikan seperti alat tangkap jaring gillnet, rumpom laut, GPS, lampu celup, fish finder dan mesin kapal di 18 Kab./Kota yang telah disalurkan ditahun 2021, yang merupakan salah satu bantuan stimulus dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap.

Peningkatan produksi perikanan tangkap di laut disebabkan oleh: (1) Nilai komoditas hasil penangkapan ikan di laut lebih tinggi dibandingkan di perairan umum; (2) Implementasi cara penanganan ikan yang baik (CPIB) di atas kapal dan di pelabuhan perikanan menyebabkan kualitas hasil tangkapan di laut lebih baik; (3) Infrastruktur yang mendukung akses terhadap pasar di kawasan pesisir lebih baik dibandingkan dengan fasilitas yang tersedia di sekitar perairan umum daratan; (4) Usaha penangkapan ikan di perairan umum bukan merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat sekitar.

**TABEL 3.8. RINCIAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2016-2021 MENURUT KOMODITAS IKAN UTAMA (TON)**

NO	Rincian	Tahun						Kenaikan Rata-rata/Tahun(%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021*	
	Volume produksi	265.039,70	307.887,43	310.045,18	316.483,63	319.648,46	283.676,36	19,92
I	Perikanan tangkap	180.872,60	208.348,64	208.515,61	209.174,39	211.266,13	283.676,36	16,66
A	Perikanan Tangkap laut	176.376,91	202.316,13	202.125,48	202.899,15	204.921,93	275.116,63	16,06
1	Tuna/Cakalang/Tongkol	101.971,24	110.676,23	107.472,69	110.869,35	111.978,05	150.343,11	9,87
2	Kakap	17.427,61	20.588,42	20.855,87	20.625,58	21.391,61	28.679,73	22,11
3	Kembung	6.571,17	8.733,68	9.023,53	8.821,34	9.517,14	12.759,63	41,94
4	Tenggiri	7.329,88	9.589,74	9.674,84	9.655,25	9.751,80	13.074,24	32,58
5	Selar	15.690,05	18.712,50	19.838,41	18.227,88	19.655,76	26.352,48	25,06
6	Rajungan dan Kepiting	8.671,72	8.988,46	8.815,76	9.444,13	9.538,57	13.023,01	9,93
7	Lobster	4.482,31	4.481,53	4.790,61	4.475,94	4.520,70	6.172,11	1,38
8	Ikan Lainnya	14.232,93	20.545,57	21.653,77	20.779,68	18.568,30	24.712,32	35,13
B	Perikanan Tangkap PUD	4.495,69	6.032,51	6.390,13	6.275,24	6.344,20	8.559,73	39,48
1	Ikan	3.074,59	4.302,78	4.653,86	4.531,37	4.172,20	5.696,30	37,62
2	Udang	1.415,22	1.720,41	1.726,75	1.734,14	2.161,36	1.892,37	46,97
3	Lainnya	5,88	9,32	9,52	9,73	10,64	971,05	90,26

*Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2021 (diolah DKP Aceh); Ket : \* data sementara*

Produksi perikanan tangkap di laut tahun 2021 berdasarkan komoditas utama menunjukkan komoditas tuna/cakalang/tongkol mencapai 111.978,05 ton, kakap mencapai 21.391,61 ton, kembung mencapai 9.517,14 ton, tenggiri mencapai 9.751,80 ton, selar mencapai 19.655,76 ton, rajungan dan kepiting mencapai 9.538,57 ton, lobster mencapai 4.520,70 ton dan komoditas ikan lainnya mencapai 18.568,30 ton, sedangkan pada perikanan tangkap PUD terdiri dari komoditas ikan 4.172,20 ton, udang 2.161,36 ton, dan jenis lainnya mencapai 10,64 ton. Pertumbuhan perikanan

tangkap di laut dan perairan umum berdasarkan komoditas utama dalam kurun waktu 2016-2021 menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap Aceh secara total mengalami peningkatan yang fluktuatif, dari triwulan I hingga triwulan IV tahun 2021.

Untuk memacu peningkatan volume produksi perikanan tangkap, ke depan perlu dilakukan upaya dan kegiatan antara lain optimalisasi operasional bantuan sarana penangkapan ikan, percepatan pembangunan pelabuhan PPI P3D, peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, Optimalisasi pendataan produksi perikanan tangkap di pusat-pusat pendaratan termasuk tangkahan, Penguatan pendataan dan penambahan SDM pengumpulan data di area WPP 571 dan WPP 572.

## 2. Produksi Perikanan Budidaya

Capaian produksi perikanan budidaya pada tahun 2021 sebesar 134.270,70 ton dan jika dibandingkan dengan target pada tahun 2021 yakni sebesar 128.270,70 ton maka capaian produksi perikanan budidaya adalah sebesar 104,51%. Produksi perikanan budidaya tahun 2021 meningkat sebesar 23,88 persen dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 25.888,37 ton dan kenaikan 25,12% dari tahun 2019.

**TABEL 3.9. VOLUME PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2018-2021 (TON)**

REALISASI			TAHUN 2021*				RENSTRA DKP 2018-2022	
TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2021	TARGET	% CAPAIAN TERHADAP TARGET 2021
101.529,57	107.309,24	108.382,33	128.470,30	134.270,70	104,51	12,66	138.682,00	96,82

*Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2021 (diolah DKP Aceh); Ket : \* data sementara*

Jika dilihat selama periode 2018-2021, volume produksi perikanan budidaya selama waktu tersebut terus mengalami peningkatan dengan kenaikan rata-rata per tahunnya sebesar 12,66 persen per tahun dari 101.529,57 ton di tahun 2018 menjadi 134.270,70 ton di tahun 2021\*). Sedangkan realisasi volume produksi perikanan

budidaya tahun 2021 sebesar 134.270,70 ton atau mencapai 96,82% apabila dibandingkan dengan target akhir renstra 2018-2022 yaitu sebesar 138.682 ton.

**TABEL 3.10. RINCIAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2016-2021 MENURUT KOMODITAS UTAMA (TON)**

NO	Rincian	Tahun						Kenaikan Rata-rata/Tahun(%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021*	
I	Perikanan Budidaya	84.167,10	99.538,79	101.529,57	107.309,24	108.382,33	134.270,70	27,00
1	Bandeng	13.978,58	14.320,20	14.446,90	16.101,71	16.262,73	22.351,54	15,86
2	Belanak	1.277,43	1.597,69	1.662,11	2.112,47	2.133,60	-	57,00
3	Mas	7.096,44	8.585,54	8.572,42	9.096,21	9.187,17	11.162,41	27,98
4	Lele	15.742,17	18.640,89	18.655,77	19.598,21	19.794,19	24.049,94	24,59
5	Patin	377,78	401,21	455,98	480,82	485,63	590,04	26,34
6	Nila	11.123,07	12.700,65	13.155,70	13.590,24	13.726,14	16.677,26	22,11
7	Kerapu	1.862,82	2.023,23	2.166,25	2.415,51	2.439,67	2.964,19	28,23
8	Udang	31.330,56	39.802,72	40.871,63	42.239,06	42.661,45	54.446,48	34,13
9	Ikan Lainnya	1.378,25	1.466,66	1.542,81	1.675,00	1.691,75	2.028,82	21,21

*Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2021 (diolah DKP Aceh); Ket : \* data sementara*

Produksi perikanan budidaya tahun 2021 berdasarkan komoditas utama menunjukkan komoditas udang yang merupakan produksi tertinggi mencapai 54.446,48 ton, kemudian diikuti oleh ikan lele mencapai 24.049,94 ton, bandeng mencapai 22.351.54 ton, nila mencapai 16.677,26 ton, mas mencapai 11.162,41 ton, kerapu mencapai 2.964,19 ton, patin mencapai 590,04 ton dan ikan lainnya mencapai 2.028,82 ton. Pertumbuhan perikanan budidaya berdasarkan komoditas utama dalam kurun waktu 2016-2021 menunjukkan bahwa produksi perikanan budidaya di Aceh secara total mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 27,00%.

Tercapainya produksi perikanan budidaya dari target tahun 2021 antara lain disebabkan oleh meningkatnya pembudidayaan udang jenis vaname dengan sistem intensif sehingga mampu meningkatkan produksi udang Aceh. Selain itu juga dipacu oleh produksi ikan lele yang dibudidayakan dengan sistem bioflok yang mampu meningkatkan produksi. Adapun kebijakan pemerintah dalam menangani wabah covid

19 dalam bentuk stimulus ekonomi mampu menggairahkan petani kolam atau tambak untuk mengelola kembali usaha budidayanya, yang ditopang dengan meningkatnya permintaan pasar dari jenis komoditi unggulan budidaya.

Peningkatan volume produksi perikanan budidaya tahun 2021 secara keseluruhan untuk semua komoditas utama didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Industrialisasi perikanan budidaya, dengan fokus pada komoditas udang, bandeng dan ikan lele. Kegiatan utama dalam industrialisasi, khususnya untuk usaha udang dan lele adalah bantuan sarana dan prasarana (benih unggul, pakan dan penerapan teknologi sistem bioflok) dan pendampingan teknis budidaya;
- Pengembangan sistem produksi melalui (i) Pengembangan input teknologi yang sesuai standar (teknologi anjuran), aplikatif, efektif dan efisien berbasis wawasan lingkungan; (ii) Meningkatkan daya saing produk hasil produksi budidaya melalui percepatan pelaksanaan kegiatan sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB); (iii) Pengembangan percontohan usaha perikanan budidaya sebagai upaya dalam mensosialisasikan model pengelolaan budidaya berkelanjutan;
- bantuan pemerintah berupa revitalisasi lahan tambak dan kolam, benih dan pakan, alat produksi budidaya dan lainnya yang dipusatkan berdasarkan pada pengembangan kawasan komoditas unggulan klaster perikanan budidaya;
- Pengembangan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan melalui kegiatan terobosan utama pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Balai Benih Ikan Pantai;

## **IKU 6. Produksi Garam**

Kebutuhan garam akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan industri pengguna garam. Kebutuhan garam dalam daerah sampai saat ini belum bisa dipenuhi dari produksi garam daerah karena beberapa faktor yaitu teknologi yang masih tradisional, alih fungsi lahan tambak menjadi kawasan industri atau permukiman, serta produksi garam yang sangat dipengaruhi cuaca. Ada dua langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan

kuantitas garam yaitu ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru dan intensifikasi dengan inovasi teknologi dan manajemen lahan pegaraman.

Produksi garam Aceh merupakan penjumlahan dari produksi garam rakyat yang terdapat di 8 Kabupaten/Kota. Target produksi garam tahun 2021 berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebesar 33.205,02 ton, lebih besar dari target tahun 2020 sebesar 7.662,7 ton.

**TABEL 3.11. CAPAIAN PRODUKSI GARAM TAHUN 2018-2021 (TON)**

REALISASI			TAHUN 2021*				RENSTRA DKP 2018-2022	
TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020(r)	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% PENINGKATAN 2018-2021	TARGET	% CAPAIAN TERHADAP TARGET 2021
17.721,50	17.773,68	16.514,93	33.205,02	17.509,51	52,73	-5,28	43.166,52	40,56

*Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2021 (diolah DKP Aceh); Ket : \* data sementara*

Sampai dengan triwulan IV tahun 2021, produksi garam mencapai 17.509,51 ton atau mencapai 52.73% dari target yang ditetapkan. Realisasi produksi garam di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 7,96% apabila dibandingkan dengan produksi garam tahun 2019 yaitu sebesar 16.514,93 ton atau 6,02%. Apabila dibandingkan dengan target 2022 (Renstra DKP Aceh Tahun 2017-2022), realisasi tahun 2021 mencapai sebesar 40,56%, diperlukan kerja keras untuk dapat mencapai target produksi sebesar 43.166,52 ton di tahun 2022. Penyebab tidak tercapainya produksi garam terhadap target tahun 2021 dikarenakan terjadinya musim hujan yang lebih panjang dan masih banyaknya petani garam berskala tradisional yang memproduksi garam dengan sistem perebusan.

Target 25,542,32 ton sulit terpenuhi karena program ekstensifikasi lahan belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Di sisi lain teknologi pergaraman yang telah dikembangkan belum mampu meningkatkan produksi garam secara signifikan. Jumlah produksi garam tahun 2021 sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 karena musim panas yang lebih panjang. Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung capaian produksi garam, yaitu melalui Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR). PUGaR

merupakan program nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan petambak garam rakyat dan mendorong terwujudnya Swasembada Garam. Berikut rincian distribusi jumlah produksi garam di kabupaten penghasil garam.

**TABEL 3.12. PRODUKSI GARAM (TON) PER KABUPATEN SENTRA GARAM ACEH**

NO	KAB/KOTA	PRODUKSI (TON)		
		2019	2020	2021*
1	Aceh Selatan	19,45	20,90	23,36
2	Aceh Barat Daya	47,32	45,42	55,91
3	Aceh Besar	1.399,75	1.811,44	478,33
4	Pidie	7.814,00	7.056,45	5.777,75
5	Pidie Jaya	1.160,19	1.470,20	1.391,46
6	Bireuen	3.259,72	2.643,19	6.327,54
7	Aceh Utara	3.005,35	2.210,07	2.174,45
8	Aceh Timur	1.067,90	1.257,27	1.280,71
<b>TOTAL PRODUKSI</b>		<b>17.773,68</b>	<b>16.514,93</b>	<b>17.509,51</b>

*Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2021 (diolah DKP Aceh); Ket : \* data sementara*

Pada tahun 2021 produksi garam tertinggi terdapat pada Kabupaten Bireuen sebesar 6.327,54 ton, kemudian diikuti Kabupaten Pidie sebesar 5.777,75 ton, Aceh Utara sebesar 2.174.45 ton, Pidie Jaya 1.391,46, Aceh Timur sebesar 1.280,71 ton, Aceh Besar sebesar 478,33 Aceh Barat Daya sebesar 55,91 ton dan Aceh Selatan sebesar 23,36 ton.

Meskipun produksi garam telah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target produksi garam antara lain : 1) produksi garam masih tergantung dengan cuaca, teknik produksi masih tradisional dengan kemampuan SDM yang terbatas, disisi lain inovasi teknologi masih terbatas dan memerlukan biaya tinggi; 2) Program ekstensifikasi di delapan Kabupaten/Kota belum berjalan dengan baik; 3) Lahan integrasi yang dilaksanakan di tahun 2021, beberapa daerah masih belum berproduksi hingga akhir musim sehingga proses rekonsiliasi/penataan lahan terlambat 4) Rendahnya harga garam menyebabkan banyak petambak enggan untuk berproduksi karena biaya yang

dikeluarkan tidak sebanding dengan pendapatan; 5) Masih berlanjutnya wabah covid 19 sehingga tingkat permintaan pasar masih rendah;

Solusi terhadap kendala pencapaian kinerja di atas, yaitu: Implementasi rumah tunnel dan rumah prisma di beberapa daerah melalui dana APBN/APBA agar produksi garam dapat dilakukan pada musim penghujan; peningkatan kapasitas SDM dibidang produksi garam dan marketing; ekstensifikasi lahan dengan melibatkan BUMN dan swasta (proses karena melibatkan instansi lainnya). Beberapa hal sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan produk garam antara lain Percepatan penyelesaian rekonsiliasi/penataan lahan integrasi agar dapat berproduksi secara optimal, manajemen stok dengan melibatkan gudang-gudang rakyat yang telah mendapatkan SNI berkoordinasi dengan gudang garam nasional (GGN) yang telah ada dengan skema resi gudang, ekstensifikasi lahan dan perencanaan integrasi lahan dilakukan sebelum tahun pelaksanaan kegiatan.

Capaian produksi garam tahun 2021 didukung oleh kegiatan :

- Modernisasi produksi garam dari proses perebusan menjadi sistem rumah tunnel; dan
- Pengembangan usaha garam melalui pembinaan, revitalisasi lahan dan bantuan sarana produksi garam.

#### **E. Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan neraca perdagangan perikanan**

Selama dua tahun yaitu tahun 2018-2021, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan tercapainya sasaran strategis meningkatkan neraca perdagangan perikanan yaitu dengan melihat tingkat ekspor perikanan Aceh. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh menggunakan satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu nilai ekspor perikanan (USD).

## IKU 7. Nilai Ekspor Perikanan (USD)

Nilai ekspor perikanan adalah jumlah komoditas produk perikanan, baik hidup, segar, dingin, maupun olahan yang dijual ke luar negeri yang dikonversi dalam bentuk uang (US Dollar). Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh.

TABEL 3.13. **CAPAIAN NILAI EKSPOR PERIKANAN ACEH TAHUN 2018-2021**

Sasaran Strategis-4			Meningkatkan neraca perdagangan perikanan				
IKU-7			Nilai ekspor perikanan (USD)				
REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	2021**			TARGET AKHIR RENSTRA	(% CAPAIAN 2018-2022)
			TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN		
4.408.162,00	2.986.439,00	1.837.400,00	1.631.646,00	2.051.244,00	125,72	1.794.561,00	114,30

*Sumber : BPS Aceh, 2021 (diolah DKP Aceh); Ket : \*\*= data sementara*

Pada tahun 2021, realisasi nilai ekspor perikanan sebesar 2,0 juta USD atau telah mencapai 125,72% dari target tahun 2021 yaitu sebesar 1,6 juta USD. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu sebesar 1,8 juta USD, capaian tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 11,64%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target 2022 pada dokumen Renstra DKP Aceh 2017-2022 yaitu sebesar 1,7 juta USD, realisasi tahun 2021 telah mencapai 114,30%.

Terdapat lima komoditas penyumbang terbesar nilai ekspor hasil perikanan tahun 2021 yaitu udang dan kepiting mencapai 1,1 juta USD (56,95%), (tuna,tongkol,cakalang) mencapai 0,7 juta (35,55%), kerapu sebesar 0,1 juta USD (6,11%), dan lobster sebesar 28 ribu USD (1,39%).

Salah satu penyebab tercapainya nilai ekspor perikanan tahun 2021 dikarenakan meningkatnya produksi komoditas utama seperti udang vaname, yang menyebabkan peningkatan volume ekspor jenis udang segar dan juga terjadinya peningkatan volume tangkapan ikan jenis tuna, tongkol dan cakalang.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- Negara pengimpor produk perikanan seperti Singapura, China dan Jepang semakin memperketat kriteria dan kualitas produk impornya, seperti jaminan keamanan produk perikanan dan non-IUU, sustainability dan traceability;
- Beberapa produk perikanan Indonesia dinilai belum memenuhi standar kualitas pasar Jepang;
- Potensi diversifikasi tujuan pasar baru seperti Afrika, Timur Tengah, Rusia, dan Amerika Latin masih mengalami hambatan, mengingat Indonesia belum mempunyai Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) sehingga akses pasar ke kawasan tersebut belum terbuka secara maksimal.

Untuk mengatasi kendala tersebut, tindak lanjut yang akan dilakukan ke depan, antara lain:

- Pengembangan diversifikasi dan penguatan branding produk ekspor yang didukung dengan hasil riset dan pemantauan pasar;
- Peningkatan mutu produk kelautan dan perikanan untuk komoditas ekspor yang bernilai ekonomis penting seperti udang, tuna, lobster dll melalui pengembangan sistem rantai dingin, sertifikasi mutu, dan pemenuhan persyaratan dari negara pengimpor;
- Mendorong penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal perikanan dan supplier dan Cara Budidaya Ikan yang Baik;
- Percepatan penyelesaian hambatan ekspor dan perluasan pasar ekspor;
- Berpartisipasi aktif dalam kerjasama dengan organisasi perdagangan internasional dan pemerintah negara tujuan ekspor dalam rangka peningkatan akses pasar produk perikanan;
- Memperbaiki distribusi pasokan bahan baku;
- Peningkatan jejaring pasar domestik dan internasional melalui promosi dagang seperti partisipasi dalam pameran.

## F. Sasaran Strategis 5 : Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir

Sasaran startegis ini memiliki 3 Indikator Kinerja Utama yakni (i) Luas kawasan konservasi perairan (ha), (ii) Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%), (iii) Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%).

### 1. Luas Kawasan Konservasi Perairan Ekspor Perikanan

Pembentukan kawasan konservasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengelola sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama Jumlah Luas Kawasan Konservasi merupakan luas kawasan konservasi yang dikelola dan dimanfaatkan selama tahun 2021. IKU Luas Kawasan Konservasi yang di tetapkan adalah jumlah penambahan luas kawasan konservasi baru yang dicadangkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah atau Surat Keputusan Menteri yang diatur melalui beberapa tahapan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan. Sampai dengan tahun 2021, realisasi luas kawasan konservasi sampai pada Tahun 2021 yaitu seluas 167.213,11 ha atau sebesar 59,61 % dari target 280.500 ha. Capaian jumlah luas kawasan konservasi disajikan pada Tabel 3.14 berikut.

TABEL 3.14. **CAPAIAN LUAS KAWASAN KONSERVASI (HA)**

Sasaran Strategis-5			Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir					
IKU-8			Luas kawasan konservasi perairan (ha)					
REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	2021*			% Kenaikan 2018-2021	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN 2018-2022
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN			
149.228,57	150.331,32	161.772,35	280.500,00	167.213,11	59,61	9,19	281.100,00	59,49

Sumber : DKP Aceh 2021; Ket : \* data sementara

Jika dibandingkan dengan penambahan luasan pada tahun 2020 sebesar 11.441,03 hektar maka tahun 2021 mengalami perlambatan penambahan kawasan

konservasi yang hanya mencapai sebesar 5.440,76 hektar, dengan tingkat pertumbuhan pertahun 2018-2019 sebesar 9,19%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 pada Renstra DKP Aceh 2018-2022 sebesar 281.100 ha, maka capaian di tahun 2021 mencapai 59,49%.

Luas kawasan 167.213,11 ha tersebut terdiri dari 27 kawasan konservasi kewenangan pemerintah provinsi atau yang disebut Kawasan Konservasi Perairan Daerah. Rincian luas kawasan konservasi disajikan pada tabel berikut :

**TABEL 3.15. LUAS KAWASAN KONSERVASI (HA)**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAWASAN	LUAS (Ha)
1	Aceh Besar*	8	29.818,77
2	Aceh Jaya	2	46.176,23
3	Aceh Barat Daya	6	16.117,05
4	Aceh Selatan*	5	4.590,34
5	Simeulue*	4	67.713,51
6	Aceh Tamiang	2	2.797,21

*Sumber : DKP Aceh, 2021*

Penyebab tidak tercapai target luas kawasan konservasi perairan karena terjadi perubahan anggaran pada tahun 2021 yang dialihkan untuk penanganan wabah covid-19 sehingga banyak calon kawasan konservasi tidak dapat ditetapkan. Selain itu, terdapat perubahan lokasi pencadangan kawasan sehingga mengurangi wilayah yang telah direncanakan pada awal tahun 2021.

Berdasarkan analisis di atas, maka upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan pada tahun 2022, yaitu identifikasi biofisik dan sosial ekonomi potensi kawasan konservasi baru, yaitu di Kabupaten Aceh Simeulue, Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Tamiang. Hasil identifikasi potensi tersebut diharapkan dapat dicadangkan sebagai kawasan konservasi baru.

Tantangan dalam pencapaian luas kawasan konservasi adalah pengelolaan kawasan konservasi secara terintegrasi, dimana sebelum ditetapkan dan dikelola, sebuah kawasan konservasi harus disusun zonasi dan rencana pengelolaannya. Oleh

karena itu, pendampingan pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan zonasi dan rencana pengelolaan terus dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan serta mitra terkait.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai target IKU selama tahun 2021 di antaranya :

- a. Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- b. Identifikasi Potensi Calon Kawasan Konservasi Perairan dan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. Percepatan penetapan Kawasan Konservasi Daerah dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi syarat penetapan kawasan konservasi;
- d. Fasilitasi penetapan kawasan konservasi dengan adanya penambahan kawasan baru melalui Pencadangan oleh Gubernur;
- e. Dengan mengoptimalkan kerjasama dengan stakeholders terkait seperti akademisi, NGO, masyarakat, pemerintah kabupaten kota untuk meningkatkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan luasan kawasan Konservasi perairan di Aceh mencapai target 281 ribu Ha.

## **2. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman**

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman merupakan IKU mengukur sejauh mana kebijakan perikanan tangkap dalam melakukan pengelolaan perikanan di suatu Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) atau jenis ikan tertentu, sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

**TABEL 3.16. PROPORSI TANGKAPAN IKAN SELAMA 2017-2021 TERHADAP MSY (%)**

TAHUN	2017	2018	2019	2020	2021*
Produksi Tangkap (ton)	208.349	208.516	209.174	211.266	283.676
% terhadap MSY Aceh	76,40	76,46	76,70	77,47	87,25

*Sumber : DKP Aceh, 2021; Ket : \*=Angka sementara*

Pada tahun 2021 jumlah tangkapan ikan aceh mencapai 283.676 ton atau 87,25% dari Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia khususnya di wilayah perairan WPP 571 dan 572, dengan jumlah produksi tersebut maka penangkapan ikan di laut Aceh masih dikategorikan aman, namun dilihat dalam empat tahun terakhir proporsi tangkapan ikan mengalami peningkatan dari angka 76,40% pada tahun 2017 menjadi 87,25% pada tahun 2021, Capaian ini masih berada dalam batas biologis yang aman, namun tidak menurunkan kondisi ekonomi pelaku usaha di bidang perikanan tangkap. Hal ini menandakan bahwa potensi sumber daya ikan belum dioptimalkan karena penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tradisional masih di sekitar perairan pesisir dan laut dangkal seperti Selat Malaka serta tingkat pemanfaatan sumber daya ikan masih di bawah nilai MSY.

Upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam menangani keberlangsungan ikan yang aman yaitu dengan melakukan sosialisasi penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan bantuan penggantian alat tangkap, peningkatan kapasitas bagi Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di 18 Kabupaten/Kota untuk mengawasi semua upaya yang merusak lingkungan laut, sehingga diharapkan dapat terjaganya kelestarian ikan di wilayah penangkapan Aceh (WPP 571 dan WPP 572). Selain itu, untuk pemenuhan kebutuhan ikan konsumsi dilakukan peningkatan produksi dari hasil budidaya payau, tawar maupun laut.

### 3. Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial

Rasio kawasan lindung terhadap total luas perairan teritorial adalah perbandingan antara luas kawasan yang dilindungi terhadap luas suatu wilayah yang dinyatakan dalam persentase. Kawasan yang dilindungi meliputi luas padang lamun, hutan mangrove dan terumbu karang yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga keanekaragaman hayati dan sumber-sumber alam yang terkait, dikelola secara resmi dan efektif.

TABEL 3.17. **CAPAIAN RASIO LUAS KAWASAN TERHADAP PERAIRAN TERITORIAL (%) 2018-2021**

Sasaran Strategis-5			Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir					
IKU-9			Rasio Luas kawasan terhadap perairan teritorial (%)					
REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	2021*			% Kenaikan 2018-2021	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN 2018-2022
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN			
2,64	2,66	2,86	4,96	2,96	59,60	9,19	4,97	59,48

Sumber : DKP Aceh, 2021; Ket : \*= Angka sementara

Pada tahun 2021 rasio kawasan lindung perairan Aceh mencapai 2,96% atau 167.213,11 ha, dari total luas teritorial Aceh sebesar 5.656.300 Ha dan belum melampaui terget tahun 2021 sebesar 4,96% atau 59,60%. Bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 11.441,03 ha luas kawasan konservasi perairan mengalami perlambatan sebesar 52,44% atau terealisasi sebesar 5.440,76 ha.

Upaya yang telah dan terus akan dilakukan untuk meningkatkan kawasan konservasi antara lain percepatan penyusunan SK Gubernur Aceh tentang penetapan pencadangan kawasan konservasi perairan Aceh, melakukan sosialisasi kawasan konservasi bagi masyarakat perikanan dan penanaman mangrove dikawasan konservasi bentuk wujud dari rehabilitasi kawasan konservasi.

Pembentukan kawasan konservasi ini juga didukung kemitraan dengan LSM yang memfasilitasi pelaksanaan identifikasi lokasi kawasan konservasi dan/atau proses

penetapan kawasan konservasi , antara lain penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam meningkatkan koordinasi dan sinergi program dengan Kabupaten/Kota, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh melakukan serangkaian pertemuan terkait dengan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan, seperti sinkronisasi program/kegiatan, pertemuan monev dan pelaporan APBA sumber dana otsus dan migas dan pertemuan validasi data indeks kriteria teknis Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan bentuk koordinasi dan sinergi program dengan Kementerian/Lembaga yaitu mengikuti proses penyusunan anggaran untuk setiap program/kegiatan yang bersumber dari dana APBN yang difasilitasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Permasalahan dan hambatan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah antara lain :

- a. Sumberdaya Manusia yang masih terbatas;
- b. Sarana dan prasarana penangkapan ikan seperti armada perikanan, alat tangkap dan pengelolaan sumberdaya ikan yang masih kurang sehingga membatasi kegiatan perikanan tangkap; serta sarana prasarana pelabuhan yang belum optimal;
- c. Sarana pendukung dan infrastruktur perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang belum tersedia secara optimal;
- d. Belum optimalnya kebijakan dalam pemanfaatan potensi budidaya laut;
- e. Pengolahan dan produksi hasil perikanan belum berjalan dengan baik;
- f. Belum terselesaikannya dokumen RZWP3K, RSWP3K, dan RPWP3K, dan RAPW3K;
- g. Belum terpusatnya/focus perencanaan program jasa pada bidang kelautan dan perikanan;
- h. Pemberdayaan masyarakat pesisir belum optimal;
- i. Belum optimalnya pembinaan tentang pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan;

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah:

- a. Provinsi Aceh merupakan daerah yang terletak di ujung bagian barat pulau Sumatera yang dikelilingi oleh lautan yaitu Samudera Hindia di wilayah barat-selatan Aceh, serta Selat Malaka dan Perairan Andaman di wilayah Utara-Timur Aceh. Panjang pantai Aceh mencapai 2.666,27 Km dan luas perairan laut Aceh mencapai 295.370 km<sup>2</sup>. Meninjau luasnya wilayah perairan laut Aceh, maka diprediksikan bahwa masih luas wilayah perairan yang belum tereksplorasi sehingga potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Aceh masih besar.
- b. Sejumlah besar aparaturnya Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh memiliki pendidikan yang berkompetensi sehingga mampu mencari solusi dari segala permasalahan dalam upaya mensejahterakan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan.
- c. Masyarakat mulai memahami bahwa sumber daya kelautan dan perikanan merupakan bahagian terpenting dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat.
- d. Aceh memiliki Lembaga Adat Laot yang berperan dalam pengawasan sumber daya kelautan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Berbagai kearifan lokal yang dihasilkan oleh lembaga ini juga mendukung kegiatan konservasi sumber daya laut yang mengarah kepada kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.
- e. Degradasi lingkungan sensitive (mangrove, terumbu karang) dan penurunan produktivitas perairan serta masih maraknya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (destructive fishing).
- f. Masih tingginya ketergantungan pada input dari luar yang membuat pelaku usaha perikanan khususnya pembudidaya ikan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi produk yang datang dari luar seperti penyediaan pakan dan sarana produksi lainnya.
- g. Masih belum optimalnya penyediaan sarana prasarana pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

Peluang yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembangunan sektor Kelautan dan perikanan adalah :

- a. Kemauan masyarakat untuk belajar mulai tumbuh;
- b. Minat masyarakat untuk memahami teknologi sangat tinggi;

- c. Kerjasama masyarakat dalam mengawasi sumber daya kelautan terbuka lebar dengan membentuk kelompok masyarakat pengawas;
- d. Peluang Usaha budidaya laut dan budidaya payau serta budidaya air tawar terbuka lebar;
- e. Unit pembenihan rakyat mulai diminati masyarakat;
- f. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik serta sertifikasi tambak;
- g. Dukungan terhadap pengelolaan bersama sudah mulai terbentuk dalam masyarakat terutama nelayan dan petambak;
- h. Mulai memahami pentingnya informasi pasar dalam menentukan harga jual;
- i. Tersedianya lahan yang belum dimanfaatkan;
- j. Terdapatnya Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) yang bergerak dalam pelayanan sektor perikanan.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPA**

Tahun 2023 merupakan tahun pertama jabatan Pj. Gubernur Aceh periode 2023 – 2024. Pembangunan di Aceh pada tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam dokumen awal RPJMA yang dituangkan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang telah direview, memiliki 6 program, 16 kegiatan dan 32 sub kegiatan, hal ini dapat dilihat pada tabel 15 berikut :

Tabel T-C 3.1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun 2023

SKPA : Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

No	Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				81.234.806.325					91.327.545.325	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran (%)	95,00	42.002.999.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran (%)	95,00	40.863.104.000	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi	100,00	709.749.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi	100,00	569.853.000	

No	Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Aceh (%)					Aceh (%)			
-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Prov	Jumlah dokumen Perencanaan (Dokumen)	10,00	709.749.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Prov	Jumlah dokumen Perencanaan (Dokumen)	10,00	569.853.000	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya Kinerja ASN (orang)	250,00	34.656.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya Kinerja ASN (orang)	250,00	34.623.450.000	
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	12,00	31.463.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	12,00	31.463.000.000	
-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prov	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	12,00	3.193.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prov	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	12,00	3.160.450.000	

No	Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (%)	100,00	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (%)	100,00	-	
-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Banda Aceh	Tersedianya pakaian Dinas beserta Perlengkapannya (orang)	255,00	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Banda Aceh	Tersedianya pakaian Dinas beserta Perlengkapannya (orang)	255,00	-	
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan perangkat daerah (%)	100,00	1.693.020.194	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan perangkat daerah (%)	100,00	1.119.362.214	
-	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Banda Aceh	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)	12,00	45.000.000	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Banda Aceh	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)	12,00	45.000.000	

No	Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banda Aceh	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	12,00	754.477.980	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	12,00	472.000.000	
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banda Aceh	Tersedianya bahan logistik kantor (bulan)	12,00	343.542.214	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banda Aceh	Tersedianya bahan logistik kantor (bulan)	12,00	193.542.214	
-	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Banda Aceh	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12,00	200.000.000	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Banda Aceh	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12,00	150.000.000	
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov	Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (bulan)	12,00	350.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov	Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (bulan)	12,00	258.820.000	
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (bulan)	12,00	2.473.221.006	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (bulan)	12,00	2.743.630.986	

No	Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banda Aceh	Tersedianya jasa surat menyurat DKP Aceh (bulan)	12,00	14.409.591	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banda Aceh	Tersedianya jasa surat menyurat DKP Aceh (bulan)	12,00	14.409.591	
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banda Aceh	Tersedia komunikasi, sumberdaya air dan listrik (bulan)	12,00	799.999.840	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banda Aceh	Tersedia komunikasi, sumberdaya air dan listrik (bulan)	12,00	799.999.840	
-	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Banda Aceh	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	12,00	136.201.348	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Banda Aceh	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	12,00	136.201.348	
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banda Aceh	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor (bulan)	12,00	1.522.610.227	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banda Aceh	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor (bulan)	12,00	1.793.020.207	
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya barang milik daerah (unit)	40,00	2.471.008.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya barang milik daerah (unit)	40,00	1.806.807.800	

No	Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banda Aceh	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (bulan)	12,00	850.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banda Aceh	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (bulan)	12,00	850.000.000	
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banda Aceh	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor (SKPA)	1,00	1.621.008.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banda Aceh	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor (SKPA)	1,00	956.807.800	
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>		<b>Persentase kawasan konservasi yang dikelola (%)</b>	<b>40,00</b>	<b>3.980.375.666</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>		<b>Persentase kawasan konservasi yang dikelola (%)</b>	<b>40,00</b>	<b>2.072.785.666</b>	
A	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak		Jumlah ruang laut Aceh di Kab/Kota sampai dengan	2,00	2.000.000.000	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar		Jumlah ruang laut Aceh di Kab/Kota sampai dengan 12 mil	2	1.124.458.000	

No	Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Gas Bumi		12 mil yang dikelola (kab/kota)			Minyak dan Gas Bumi		yang dikelola (kab/kota)			
-	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Prov. Aceh	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K rencana pengelolaan wilayah pesisir (dokumen)	2,00	300.000.000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Prov. Aceh	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K rencana pengelolaan wilayah pesisir (dokumen)	2	185.678.000	
-	Pengelola Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari Pemerintah Pusat	A. Besar, Sabang, A. Jaya, Abdya, A. Selatan, Simeulue, A. Tamiang	Luasan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau kecil-kecil yang dikelola (Ha)	1,00	400.000.000	Pengelola Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari Pemerintah Pusat	A. Besar, Sabang, A. Jaya, Abdya, A. Selatan, Simeulue, A. Tamiang	Luasan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau kecil-kecil yang dikelola (Ha)	1,00	248.004.000	

No	Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
-	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Prov. Aceh	Jumlah dokumen luasan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (dokumen)	4,00	1.300.000.000	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Prov. Aceh	Jumlah dokumen luasan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (dokumen)	4,00	690.776.000	
B	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil		Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang terampil (orang)	35,00	1.980.375.666	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil		Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang terampil (orang)	35	948.327.666	
-	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Prov. Aceh	Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat kapasitasnya (orang)	35,00	1.980.375.666	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Prov. Aceh	Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat kapasitasnya (orang)	35	948.327.666	

No	Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
-	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Prov. Aceh	Terbinanya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	0,00	-	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Prov. Aceh	Terbinanya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	-	-	
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>		<b>Produksi perikanan tangkap (ton)</b>	<b>237.214,46</b>	<b>22.220.478.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>		<b>Produksi perikanan tangkap (ton)</b>	<b>237.214,46</b>	<b>34.863.091.000</b>	
A	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Jumlah persentase pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut Aceh (%)	100	3.900.000.000	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Jumlah persentase pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut Aceh (%)	100	3.549.359.982	
-	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Prov. Aceh	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (dokumen)	4,00	50.000.000	Kegiatan pengadaan alat bantu operasional penangkapan ikan	Prov. Aceh	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (dokumen)	4,00	73.000.000	

No	Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
-	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Prov. Aceh	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)	200,00	3.850.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Prov. Aceh	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)	200,00	3.476.359.982	
B	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah persentase pengelolaan penangkapan ikan di wilayah Perairan Umum daratan Aceh (%)	100	50.000.000	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah persentase pengelolaan penangkapan ikan di wilayah Perairan Umum daratan Aceh (%)	100,00	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
-	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kab. Aceh Barat; Kab. Aceh Besar; Kab. Aceh Selatan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (dokumen)	5,00	50.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kab. Aceh Barat; Kab. Aceh Besar; Kab. Aceh Selatan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (dokumen)	5,00	50.000.000	
C	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Jumlah pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi (lokasi)	8,00	18.270.478.000	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Jumlah pembangunan dan pengelolaan pelabuhan provinsi (lokasi)	8,00	31.263.731.018	

No	Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Kab. Aceh Barat; Kab. Aceh Selatan; Kab. Aceh Timur; Kab. Bireuen; Kota Banda Aceh; Kota Lhokseumawe; Kab. Aceh Barat Daya	Tersedianya sarana dan prasarana pada Pelabuhan Perikanan (lokasi)	8	13.070.478.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Kab. Aceh Barat; Kab. Aceh Selatan; Kab. Aceh Timur; Kab. Bireuen; Kota Banda Aceh; Kota Lhokseumawe; Kab. Aceh Barat Daya	Tersedianya sarana dan prasarana pada Pelabuhan Perikanan (lokasi)	8	24.686.374.018	

No	Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
-	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Kab. Aceh Barat; Kab. Aceh Selatan; Kab. Aceh Timur; Kab. Bireuen; Kota Banda Aceh; Kota Lhokseumawe; Kab. Aceh Barat Daya	Tersedianya pelayanan pelabuhan perikanan (bulan)	12	5.200.000.000	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Kab. Aceh Barat; Kab. Aceh Selatan; Kab. Aceh Timur; Kab. Bireuen; Kota Banda Aceh; Kota Lhokseumawe; Kab. Aceh Barat Daya	Tersedianya pelayanan pelabuhan perikanan (bulan)	12	6.577.357.000	
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>		<b>Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)</b>	<b>97,54</b>	<b>9.680.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>		<b>Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)</b>	<b>97,54</b>	<b>10.030.000.000</b>	
A	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya yang dibantu (RTP)	800	9.680.000.000	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya yang dibantu (RTP)	800	10.030.000.000	

No	Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
-	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Aceh	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	2	50.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Aceh	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	2	50.000.000	
-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Kab. Aceh Besar; Kab. Simeulue	Jumlah Balai Benih Ikan yang beroperasi (unit)	4	1.400.000.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Kab. Aceh Besar; Kab. Simeulue	Jumlah Balai Benih Ikan yang beroperasi (unit)	4	300.000.000	
-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat	Prov. Aceh	Jumlah klaster pembudidayaan ikan yang dibantu prasarannya (klaster)	37	4.170.000.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi	Prov. Aceh	Jumlah klaster pembudidayaan ikan yang dibantu prasarannya (klaster)	37	4.720.000.000	

No	Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota					dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota					
-	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau	Prov. Aceh	Jumlah klaster pembudidayaan ikan yang dibantu prasarananya (klaster)	37	4.060.000.000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau	Prov. Aceh	Jumlah klaster pembudidayaan ikan yang dibantu prasarananya (klaster)	37	4.960.000.000	

No	Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
5	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		<b>Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)</b>	62	1.448.550.000	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		<b>Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)</b>	62	1.153.803.000	
A	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan		Jumlah Kabupaten/Kota yang diawasi	18	800.000.000	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan		Jumlah Kabupaten/Kota yang diawasi	18	1.060.177.000	

No	Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perikanan Sampai Dengan 12 Mil		Sumber Daya Perikanannya (Kab/Kota)			Perikanan Sampai Dengan 12 Mil		Sumber Daya Perikanannya (Kab/Kota)			
-	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Prov. Aceh	Jumlah hari patroli pengawasan SDKP (hari)	40	500.000.000	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Prov. Aceh	Jumlah hari patroli pengawasan SDKP (hari)	40	881.052.000	
-	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	Prov. Aceh	Jumlah Kasus Pelanggaran Tindak Pidana Perikanan yang terselesaikan (kasus)	4	300.000.000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	Prov. Aceh	Jumlah Kasus Pelanggaran Tindak Pidana Perikanan yang terselesaikan (kasus)	4	179.125.000	
B	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas		Jumlah Kabupaten/Kota yang diawasi Sumber Daya Perikanannya (Kab/Kota)	23	648.550.000	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan		Jumlah Kabupaten/Kota yang diawasi Sumber Daya Perikanannya (Kab/Kota)	23	93.626.000	

No	Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					
-	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prov. Aceh	Jumlah pelaku usahapemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang diawasi (pelaku usaha)	10	648.550.000	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prov. Aceh	Jumlah pelaku usahapemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang diawasi (pelaku usaha)	10	93.626.000	
6	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>		<b>Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)</b>	5,30	1.902.403.659	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>		<b>Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)</b>	5,30	2.344.761.659	

No	Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Tersedianya usaha pengolahan hasil perikanan yang bersertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	90	702.403.659	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	0	Tersedianya usaha pengolahan hasil perikanan yang bersertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	90	479.761.659	
-	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Prov. Aceh	Tersedianya pelayanan UPTD PPMHP (bulan)	12	702.403.659	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Prov. Aceh	Tersedianya pelayanan UPTD PPMHP (bulan)	12	479.761.659	

No	Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
B	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Terpenuhinya bahan baku perikanan di kabupaten/kota (lokasi)	23	1.200.000.000	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Terpenuhinya bahan baku perikanan di kabupaten/kota (lokasi)	23	1.865.000.000	
-	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prov. Aceh	Jumlah Poklahsar yang dibina (kelompok)	30	1.200.000.000	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prov. Aceh	Jumlah Poklahsar yang dibina (kelompok)	30	1.865.000.000	

## **BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI terutama melaksanakan empat misi yaitu :

- “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
- “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
- “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
- “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi:

- “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”, dengan tujuan:
  - meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
  - menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
- “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”, dengan tujuan:
  - optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
  - meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;

- meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- meningkatnya sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
- optimalnya pengelolaan ruang laut.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan RPA Tahun 2023-2026 yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DKP Aceh yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, kemandirian fiskal daerah dan ketahanan pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial ekonomi Covid-19

Sedangkan sasaran perangkat daerah dinas kelautan dan perikanan adalah :

a. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan;

Dengan Indikator Kinerja Utama :

1. Nilai tukar nelayan (NTN);
2. Nilai tukar petani ikan (NTPi)
3. Produksi Perikanan (ton)
  - Produksi Perikanan Tangkap (ton)
  - Produksi Perikanan Budidaya (ton)

b. Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan

Dengan Indikator Kinerja Utama :

1. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh (%)
2. Nilai Ekspor Perikanan (USD)
3. Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)
4. Produksi Garam (ton)
5. Pengelolaan kawasan konservasi yang dikelola (%)
6. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku (%)

Adapun target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target Capaian Tahun 2023
1	Nilai tukar nelayan (NTN)	102,50
	Nilai tukar petani ikan (NTPi)	97,54
2	Produksi Perikanan (ton)	350.131,21
	- Produksi Perikanan Tangkap (ton)	237.214,46
	- Produksi Perikanan Budidaya (ton)	112.916,75
3	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh (%)	5,30
4	Nilai Ekspor Perikanan (USD)	2.153.806,00
6	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	59,37
7	Produksi Garam (ton)	10.600,00
8	Pengelolaan kawasan konservasi yang dikelola (%)	40,00
9	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang- udangan yang berlaku (%)	62,00

## **BAB 4. RENCANA KERJA DAN PERANGKAT DAERAH**

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPA Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Berdasarkan visi pemerintah Aceh yaitu Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintah yang Bersih, Adil dan Melayani" serta salah satu misi pemerintah Aceh yaitu "Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan" maka Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh untuk mendukung visi misi tersebut dilaksanakan melalui 6 program, 16 kegiatan dan 33 subkegiatan. Program dan kegiatan tersebut tersebar pada 23 Kabupaten/kota di Aceh dengan total anggaran yang diperlukan sebesar Rp. **91.327.545.325,-**

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPA Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh sebagaimana tabel 18 berikut:

Tabel T-C 3.3. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah an Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					91.327.545.325			143.520.837.780			
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					40.863.104.000			42.184.201.201			
3	25	01	1,01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					569.853.000			586.948.590			
3	25	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran (%)	Jumlah dokumen Perencanaan (Dokumen)	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh (%)	Prov	95,00	10,00	100,00	569.853.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		586.948.590
3	25	01	1,02		Administrasi Keuangan					34.623.450.000			35.598.944.500			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
3	25	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran (%)	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	Meningkatnya Kinerja ASN (orang)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	95,00	12,00	250,00	31.463.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			32.406.890.000	
3	25	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran (%)	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	Meningkatnya Kinerja ASN (orang)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	95,00	12,00	250,00	3.160.450.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			3.192.054.500	
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>1,05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							<b>0</b>			<b>250.000.000</b>			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
3	25	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran (%)	Tersedianya pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaianya dinas beserta perlengkapannya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	-	0	0	0	0			250.000.000	
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>1,06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>1.119.362.214</b>			<b>1.061.356.161</b>			
3	25	01	1,06	01	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran (%)	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan perangkat daerah (%)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	95,00	12,00	100,00	45.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			46.350.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
3	25	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran (%)	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan perangkat daerah (%)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	95,00	12,00	100,00	472.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			394.573.081	
3	25	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran (%)	Tersedianya bahan logistik kantor (bulan)	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan perangkat daerah (%)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	95,00	12,00	100,00	193.542.214	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			199.348.480	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	01	1,06	05	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran (%)	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan)	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan perangkat daerah (%)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	95,00	12,00	100,00	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			154.500.000	
3	25	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran (%)	Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (bulan)	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan perangkat daerah (%)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	95,00	12,00	100,00	258.820.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			266.584.600	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target				
3	25	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2.743.630.986			2.825.939.916	
3	25	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran (%)	Tersediany a jasa surat menyurat DKP Aceh (bulan)	Tersediany a Jasa penunjang urusan pemerintah an daerah (bulan)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	95,00	12,00	12,00	14.409.591	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			14.841.879
3	25	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran (%)	Tersedia komunikasi , sumberdaya air dan listrik (bulan)	Tersediany a Jasa penunjang urusan pemerintah an daerah (bulan)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	95,00	12,00	12,00	799.999.840	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			823.999.835

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
3	25	01	1,08	03	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran (%)	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	Tersedianya Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (bulan)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	95,00	12,00	12,00	136.201.348	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			140.287.388	
3	25	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran (%)	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor (bulan)	Tersedianya Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (bulan)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	95,00	12,00	12,00	1.793.020.207	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			1.846.810.813	
3	25	01	1,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>1.806.807.800</b>			<b>1.861.012.034</b>			
3	25	01	1,03	05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran (%)	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (bulan)	Terpeliharanya barang milik daerah (unit)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lampulo	95,00	12,00	40,00	850.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			875.500.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah an Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
					Lapangan													
3	25	01	1,03	18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lancamanya kebutuhan operasional perkantoran (%)	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor (SKPA)	Terpeliharanya barang milik daerah (unit)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,00	1,00	40,00	956.807.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			985.512.034	
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL							2.072.785.666				5.213.625.000		
3	25	02	1,01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi							1.124.458.000				2.911.375.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
3	25	02	1,01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase kawasan konservasi yang dikelola (%)	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K rencana pengelolaan wilayah pesisir (dokumen)	Jumlah ruang laut Aceh di Kab/Kota sampai dengan 12 mil yang dikelola (kab/kota)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40	2	2	185.678.000	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh			626.750.000	
3	25	02	1,01	02	Pengelola Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari Pemerintah Pusat	Persentase kawasan konservasi yang dikelola (%)	Luasan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola (Ha)	Jumlah ruang laut Aceh di Kab/Kota sampai dengan 12 mil yang dikelola (kab/kota)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40	1	2	248.004.000	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh			2.000.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
3	25	02	1,01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Persentase kawasan konservasi yang dikelola (%)	Jumlah dokumen luasan wilayah perairan peisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilita si (dokumen)	Jumlah ruang laut Aceh di Kab/Kota sampai dengan 12 mil yang dikelola (kab/kota)	Semua Kabupate n/Ko ta, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	40	4	2	690.776.000	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh			284.625.000	
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>02</b>	<b>1,03</b>		<b>Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil</b>						<b>948.327.666</b>				<b>2.302.250.000</b>			
3	25	02	1,03	01	Pengemb angan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase kawasan konservasi yang dikelola (%)	Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat kapasitasn ya (orang)	Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang terampil (orang)	Semua Kabupate n/Ko ta, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	40	35	35	948.327.666	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh			1.151.125.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	02	1,03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase kawasan konservasi yang dikelola (%)	Terbinanya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang terampil (orang)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40	-	35	0	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh			1.151.125.000	
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>							<b>34.863.091.000</b>			<b>45.795.573.464</b>			
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>03</b>	1,01		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>							<b>3.549.359.982</b>			<b>7.674.065.000</b>			
3	25	03	1,01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Produksi perikanan tangkap (ton)	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (dokumen)	Jumlah persentase pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut Aceh (%)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	237.214	4,00	100	73.000.000	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh			235.980.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	03	1,01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)	Jumlah persentase pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut Aceh (%)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	237.214	200,00	100	3.476.359.982	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh			7.438.085.000	
3	25	03	1,02		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>							50.000.000			50.000.000			
3	25	03	1,02	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Produksi perikanan tangkap (ton)	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (dokumen)	Jumlah persentase pengelolaan penangkapan ikan di wilayah Perairan Umum daratan Aceh (%)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	237.214	5,00	100,00	50.000.000	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh			50.000.000	
3	25	03	1,06		<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>							31.263.731.018			38.071.508.464			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	03	1,06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Produksi perikanan tangkap (ton)	Tersedia sarana dan prasarana pada Pelabuhan Perikanan (lokasi)	Jumlah pembangunan dan pengelolaan pelabuhan provinsi (lokasi)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	237.214	8	8	24.686.374.018	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh			35.693.326.898	
3	25	03	1,06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Produksi perikanan tangkap (ton)	Tersedia pelayanan pelabuhan perikanan (bulan)	Jumlah pembangunan dan pengelolaan pelabuhan provinsi (lokasi)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	237.214	12	8	6.577.357.000	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh			2.378.181.566	
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>							<b>10.030.000.000</b>			<b>49.037.415.564</b>			
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>04</b>	1,05		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>							<b>10.030.000.000</b>			<b>49.037.415.564</b>			
3	25	04	1,05	01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan (NTPi)	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya yang dibantu (RTP)	Prov. Aceh	97,54	2	800	50.000.000	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh			75.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah an Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
						Kabupaten/ Kota (dokumen)												
3	25	04	1,05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan (NTPi)	Jumlah Balai Benih Ikan yang beroperasional (unit)	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya yang dibantu (RTP)	Kab. Aceh Besar; Kab. Simeulue	97,54	4	800	300.000.000	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh				1.693.727.391

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
3	25	04	1,05	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan (NTPi)	Jumlah klaster pembudidayaan ikan yang dibantu prasarana (klaster)	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya yang dibantu (RTP)	Prov. Aceh	97,54	37	800	4.720.000.000	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh			20.693.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target				
3	25	04	1,05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan (NTPi)	Jumlah klaster pembudidayaan ikan yang dibantu prasarannya (klaster)	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya yang dibantu (RTP)	Prov. Aceh	97,54	37	800	4.960.000.000	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh			26.575.688.173
3	25	05			<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>							1.153.803.000		366.445.551			
3	25	05	1,01		<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil</b>							1.060.177.000		291.445.551			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
3	25	05	1,01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku (%)	Jumlah hari patroli pengawasan SDKP (hari)	Jumlah Kabupaten/Kota yang diawasi Sumber Daya Perikananannya (Kab/Kota)	Prov. Aceh	62	40	18	881.052.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			166.445.551	
3	25	05	1,01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku (%)	Jumlah Kasus Pelanggaran Tindak Pidana Perikanan yang terselesaikan (kasus)	Jumlah Kabupaten/Kota yang diawasi Sumber Daya Perikananannya (Kab/Kota)	Prov. Aceh	62	4	18	179.125.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			125.000.000	
3	25	05	1,02		<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>							93.626.000			75.000.000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	05	1,02	03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	Jumlah pelaku usahapemasaran danpengolahan hasil perikanan yang diawasi (pelaku usaha)	Jumlah Kabupaten/ Kotayang diawasi Sumber DayaPerikanan (Kab/Kota)	Prov. Aceh	62	10	23	93.626.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75.000.000	
3	25	06			<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>							2.344.761.659		923.577.000				
3	25	06	1,02		<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>							479.761.659		500.000.000				
3	25	06	1,02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	Tersedianya pelayanan UPTD PPMHP (bulan)	Tersedianya usaha pengolahan hasil perikanan yang bersertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	Prov. Aceh	5,30	12	90	479.761.659	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh			500.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
	dan Besar															
3	25	06	1,03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					1.865.000.000			423.577.000			
3	25	06	1,03	01	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan / distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	Jumlah Poklaksar yang dibina (kelompok)	Terpenuhi ya bahan baku perikanan di kabupaten/ kota (lokasi)	Prov. Aceh	5,30	30	23	1.865.000.000	Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh		423.577.000

## BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) sebagai rencana pembangunan tahunan adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Aceh untuk Tahun 2023 dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun 2023.

Untuk dapat terlaksananya Renja SKPA tersebut maka sangat diperlukan dukungan lintas sektor dan lembaga terkait lainnya serta para *stakeholders* kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, terutama dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Demikianlah Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 disusun, agar dapat digunakan sebagai pedoman dan arahan dalam dalam pelaksanaan program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2023.

Banda Aceh, Juni 2022

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH**



**SALIMAN, S.Pi, M.Si**

Pembina TK. I

NIP. 19750210 200312 1 005

## **SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENJA SKPA TAHUN 2023**

- KETUA TIM : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
- SEKRETARIS TIM : Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
- KELOMPOK KERJA : 1. Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil  
2. Kepala Bidang Perikanan Tangkap  
3. Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan  
4. Kepala Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan  
5. Kepala Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat

**Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH TAHUN 2023**

Provinsi : Aceh  
Nama SKPA : Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 2. Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) 3. Produksi Perikanan (ton) - Produksi Perikanan Tangkap (ton) - Produksi Perikanan Budidaya (ton)	102,50 97,54 350.131,21 237.214,46 112.916,75
2.	Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan	4. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh (%) 5. Nilai Ekspor Perikanan (USD) 6. Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) 7. Produksi Garam (ton) 8. Persentase kawasan konservasi yang dikelola (%) Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha 9. KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	5,30 2.153.806,00 59,37 10.600,00 40,00 62,00

Banda Aceh, Juni 2022  
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

  
**ALIMAN, S.Pi, M.Si**  
 NIP. 19750210 200312 1 005

